

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

LANGSUNG

Edisi 40
April 2022

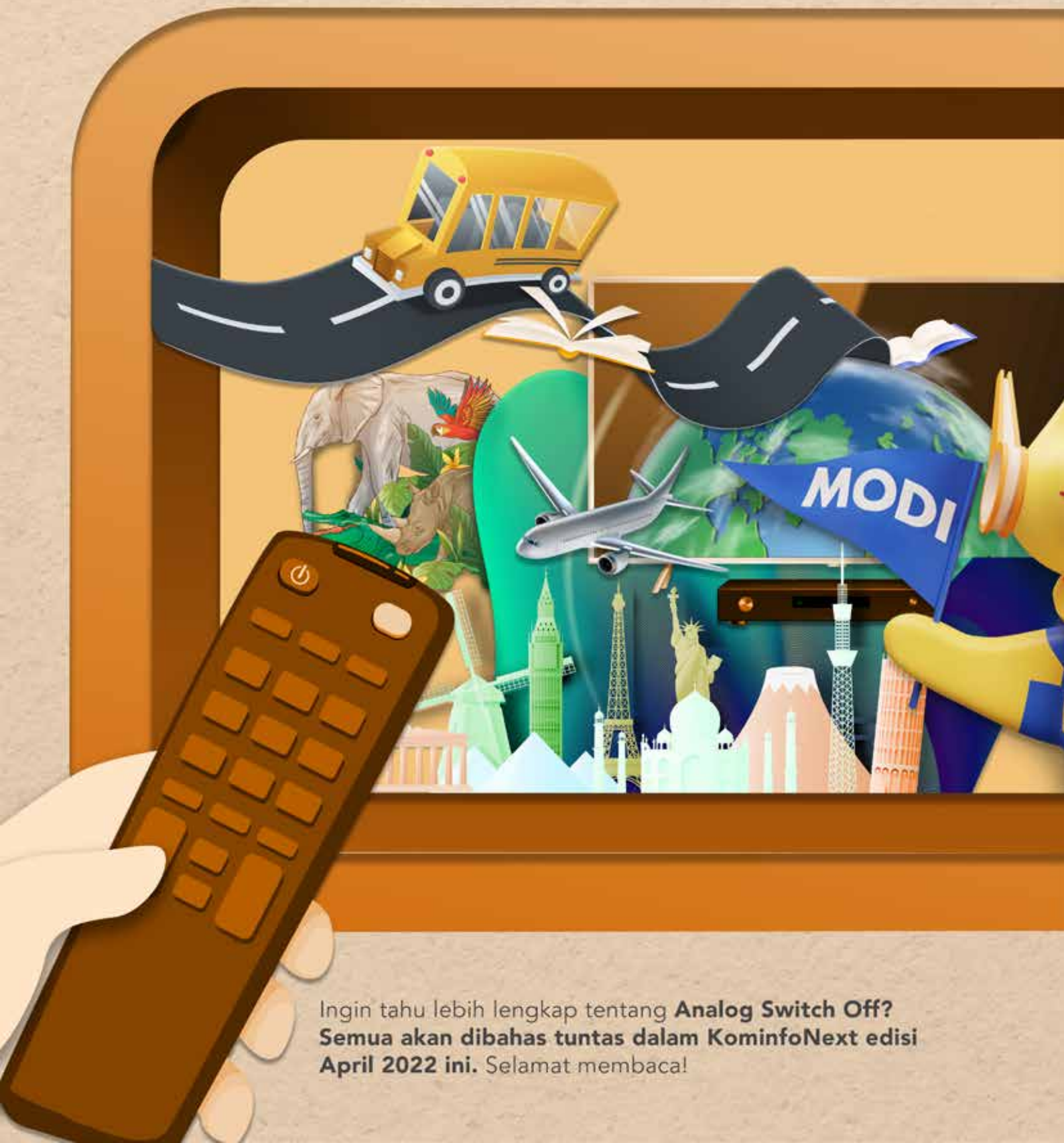


9 772655 993006

Sulit menyaksikannya?
Tenang, kesalahan bukan pada mata Anda.
Buka halaman berikutnya untuk tahu solusinya!

• Hitung Mundur

• Menuju 2 November 2022



Ingin tahu lebih lengkap tentang **Analog Switch Off?**
Semua akan dibahas tuntas dalam KominfoNext edisi
April 2022 ini. Selamat membaca!



Segera beralih ke TV Digital!

2 November 2022 akan menjadi batas akhir penghentian siaran TV analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia, digantikan dengan TV digital. Siaran TV digital menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan juga canggih teknologinya. Jadi tunggu apalagi? Ayo segera beralih ke TV digital!

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Saatnya Bermigrasi ke Siaran Digital

Para Pembaca yang Budiman, Akselerasi transformasi digital terus menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat secara holistik, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Hal ini terjadi akibat fenomena disrupsi yang mendorong negara-negara dunia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital dewasa ini adalah melalui program *Analog Switch Off (ASO)* atau lazim dikenal migrasi siaran televisi analog ke digital.

Guna mempercepat implementasi program ASO, pemerintah bersama DPR RI menerbitkan regulasi dalam bentuk Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Postelsiar. Sejak disahkan UU No. 11 Tahun 2020, Kementerian Kominfo diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan program tersebut selama dua tahun.

Sebagai tindak lanjut dari amanat UU tersebut, Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah memetakan pengimplementasian ASO ke dalam 3 tahap.

Tahap pertama paling lambat pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten/kota. Tahap kedua paling lambat pada 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran yang meliputi 110 kabupaten/kota, dan tahap ketiga paling lambat pada 2 November pada 2022, di 25 wilayah layanan siaran yang meliputi 65 kabupaten/kota. Tidak




Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**


hanya sampai di situ, sebagai upaya untuk mempercepat ASO, Kementerian Koinfo juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh tanah air tentang migrasi televisi analog ke televisi digital.

Seyogianya ada 5 alasan penting dalam hubungan dengan pengimplementasian ASO. Pertama, menjalankan amanat Pasal 60A Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas, jernih, dan bersih bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan siaran para Lembaga Penyiaran melalui *infrastructure sharing*. Keempat, mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain yang telah menyepakati penataan spektrum untuk layanan televisi dan telah menyelesaikan ASO sehingga ASO perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan di wilayah perbatasan. Kelima, melakukan pemerataan akses internet, keperluan pendidikan, sistem peringatan kebencanaan atau kegunaan lainnya dari hasil efisiensi penggunaan spektrum frekuensi.

Untuk itu, Majalah KoinfoNext edisi ini secara khusus menyajikan perkembangan implementasi ASO serta manfaatnya bagi masyarakat di seluruh tanah air, mulai dari *digital dividend*, hingga penghematan ruang frekuensi.



Guna mempercepat implementasi program ASO, pemerintah bersama DPR RI menerbitkan regulasi dalam bentuk Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Postelsiar.



Daftar Isi

8 Koinfopedia
Siaran Analog x Digital

12 Kabar Istana

18 Liputan Utama

ASO Tahap Pertama Siap
100 Persen

Era Baru Siaran TV Digital:
Indonesia Menghentikan
Siaran TV Analog

DBS untuk 113 Wilayah
Tak Terjaring ASO

34 Gagasan

38 Koinfo Daerah
Batam dan Tegal di Ambang Digital Dividend

44 Opini
Ketika Kualitas Jurnalisme Terjun Bebas

64 Liputan Khusus
Jurus Perempuan "Cantik" Kebal Hoaks

86 Portal Koinfo

94 Lintas Koinfo



Analog Switch Off Starter Kit

Set Top Box



Pilih yang bersertifikat dari Kominfo



Cari tahu kelebihan fitur



Sesuaikan kebutuhan



Cari tanda khusus di kemasan bertuliskan DVB-T2/ "Siap Digital"/ gambar Modi



Antena UHF

Siaran TV Digital tetap membutuhkan antena. Gunakan antena UHF atau antena dalam rumah. Agar tayangan tidak terganggu, pastikan antena tidak terlindungi oleh bangunan atau pohon.



Siaran Analog x Siaran Digital

Halo SobatKom!

Akhir-akhir ini, pasti SobatKom sering dengar pembahasan tentang migrasi televisi (TV) digital? Apalagi mendekati batas penghentian siaran analog tahap 1 di 30 April mendatang. Sebenarnya apa sih TV digital? Apakah program siaran yang bisa kita tonton di ponsel kayak Nutflix atau Disnplus itu ya?

Tentu bukan. Migrasi TV digital mengacu pada perubahan teknologi penyiaran, dari yang semula bersiaran secara analog, menjadi digital. Jika sebelumnya sinyal TV dipancarkan secara analog, maka nanti saat migrasi ke digital, siaran akan dipancarkan secara digital. Perubahan ini mencakup sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, hingga perangkat penerima. Penyiaran digital memungkinkan peningkatan kualitas gambar dan suara siaran. Sesuai dengan *tagline* migrasi TV digital, bersih, jernih, canggih!

Sebelum membahas lebih jauh terkait siaran analog dan digital, kita perlu memahami dulu istilah-istilah dasar terkait penyiaran. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Sementara penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.



Nah, yang dimaksud dengan spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyiaran adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3.000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa, yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.





Spektrum frekuensi radio ini tergolong ke dalam ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Karena terbatas dan sifatnya yang dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara, penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.

Bagaimana SobatKom, sudah mulai paham tentang istilah-istilah dasar terkait penyiaran? Sekarang kita akan membahas seputar perpindahan sistem siaran dari analog ke digital, terutama pada penyiaran televisi.

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun warna, yang biasanya dilengkapi dengan suara. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Secara prinsip penerimaan, terdapat dua jenis televisi, yaitu TV analog dan digital.



10

Kominfopedia

Televisi analog memancarkan dan mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal. Terdapat tiga sistem standar utama yang digunakan oleh siaran televisi analog, yaitu NTSC (National Television System Committee) yang dikembangkan oleh Amerika, PAL (Phase Alternating Line) yang dikembangkan oleh Eropa, dan SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire atau Sequential Color with Memory).

Selain membutuhkan frekuensi yang sangat tinggi untuk memancarkan siaran, dibutuhkan penangkap sinyal atau antena untuk bisa mendapatkan siaran analog. Semakin jauh letak antena dari stasiun

pemancar siaran televisi, sinyal yang diterima akan semakin lemah dan mengakibatkan gambar yang diterima oleh pesawat televisi menjadi buruk dan berbayang.

Sementara itu, pada siaran TV digital, digunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara dan data ke pesawat televisi. Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer. Sinyal digital dapat ditangkap dari sejumlah pemancar yang membentuk jaringan berfrekuensi sama, sehingga daerah cakupan TV digital menjadi luas.

Salah satu kelebihan TV digital dibandingkan dengan TV analog adalah kebutuhan frekuensi yang relatif rendah. Kebutuhan frekuensi yang lebih rendah membuat teknologi ini lebih efisien dibandingkan teknologi analog yang selama ini digunakan. Hal ini berimplikasi pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang bisa dihemat.

Pada penyiaran dengan modulasi analog, setiap pemancaran siaran televisi terestrial membutuhkan lebar pita frekuensi radio sebesar 8 Mhz. Sementara jika menggunakan modulasi digital dengan teknik multiplexing, pita frekuensi 8 Mhz dapat digunakan untuk memancarkan 6-8 kanal sekaligus untuk beberapa program yang berbeda dengan lebar pita yang sama.



Beberapa kelebihan siaran TV digital lainnya adalah:


- Kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan (interferensi, suara dan/ atau gambar rusak, berbayang, dsb).
- Tidak mengenal konsep suara/gambar berbayang yang disebabkan oleh lemahnya sinyal yang dipancarkan dan diterima. Sehingga, hanya ada dua kemungkinan dalam siaran digital, yaitu gambar bagus atau tidak ada gambar sama sekali.
- Siaran dengan resolusi tinggi berkualitas *High Definition Television* (HDTV) secara lebih efisien.
- Kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien.
- Kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus memungkinkan adanya fitur *Electronic Program Guide* (EPG).

Saat proses peralihan dari siaran analog ke digital, tentunya SobatKom membutuhkan perangkat yang kompatibel untuk menangkap siaran digital. Terdapat dua pilihan, pertama mengganti pesawat TV analog milik SobatKom dengan TV digital, atau tetap menggunakan pesawat penerima televisi analog yang dilengkapi dengan *set-top-box*. *Set-top-box* merupakan rangkaian konverter yang dapat mengubah sinyal siaran digital menjadi sinyal analog, sehingga pengguna pesawat penerima siaran televisi analog tetap bisa menikmati siaran televisi digital.

Bagaimana, sudah siap untuk migrasi ke TV digital?

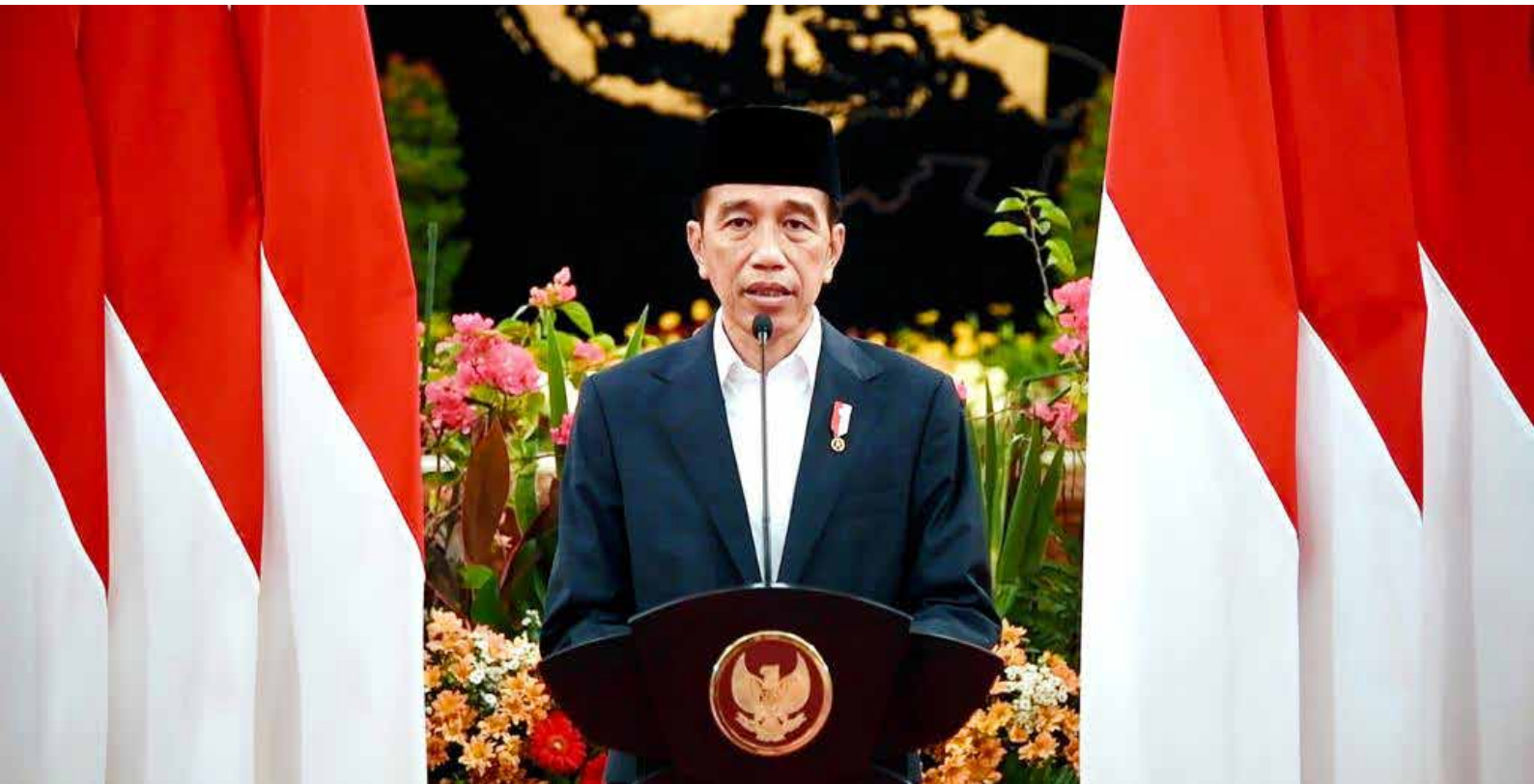
Sumber :

<https://media.neliti.com/media/publications/269790-pengaruh-inovasi-antena-pada-siaran-tele-366fac83.pdf>
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36071-men-yongsong-siaran-digital>
 Ahmad Budiman, Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia, P3DI DPR RI

Saksikan #KOMINFOPEDIA pada kanal Kemkominfo TV 

Presiden: Nuzulul Qur'an Momentum Perkuat Kebersamaan dalam Keragaman

Presiden menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan mengelola dengan baik keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Allah Swt.



Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya secara virtual pada Peringatan Nuzulul Qur'an tingkat kenegaraan, Selasa, 19 April 2022. Foto: BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam di seluruh Tanah Air untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur'an sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya secara virtual pada acara Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan 1443 H, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, pada Selasa, 19 April 2022.

“Saya mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan negeri dan bangsa yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa peringatan Nuzulul Qur’an merupakan salah satu keistimewaan bulan Ramadan sehingga umat Islam dapat mengingat diturunkannya Al-Qur’an kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia.

“Al-Qur’an merupakan mukjizat dari Allah SWT yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur’an adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai peringatan, sebagai rahmat, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan bahkan sebagai obat bagi hati yang sedang duka dan sakit,” ungkapnya.

Sebagai bangsa yang berketuhanan, Presiden mengatakan bahwa kita semua dituntut untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, konsekuensi dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah harus menerima dengan lapang dada bahwa keberagaman ini merupakan kehendak Allah Swt.

“Al-Qur’an menegaskan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada berbagai makhluk Tuhan pada hakikatnya merupakan sunnatullah, sebuah ketetapan Allah Swt., sebuah skenario Allah Swt.,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan mengelola dengan baik keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Allah Swt. Setiap elemen bangsa yang beraneka ragam diyakini memiliki kebaikan dan kelebihan masing-masing yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

“Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain,” tutur Presiden.



“Kebaikan-kebaikan yang muncul dari berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang sejatinya perlu dikedepankan untuk kepentingan bersama, dikonstruksikan untuk kemanfaatan bersama,” tandasnya.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-nuzulul-qur-an-momentum-perkuat-kebersamaan-dalam-keragaman/>



Saya mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan negeri dan bangsa yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur



Kunjungi Pura Tirta Empul, Presiden Dorong Pemeliharaan Aset Kebudayaan Negara

Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara salah satu aset negara ini.



Presiden Joko Widodo berkunjung ke cagar budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Jumat, 6 Mei 2022. Pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampaksiring ini memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata.

"Saya kira ini sebuah pura yang terpelihara, yang bersih, dan juga wisatawan sekarang mulai banyak datang," ujar Presiden.

Pura Tirta Empul termasuk dalam lanskap subak dan pura daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara salah satu aset negara ini.

"Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga pada pemerintah daerah, ada income di sana," lanjutnya.

Bendesa adat Pura Tirta Empul, Made Mawiarnata, mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19 ini pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun, Made bersyukur saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan kembali di sana.

"Wisatawan sudah mulai berdatangan terutama dari wisatawan domestik. Dari mancanegara sudah ada, namun hanya beberapa. Berkat peluang yang telah diberikan oleh pemerintah kita, ini sangat mendukung," ucap Made.

Lebih lanjut, Made mengajak seluruh masyarakat untuk memperkenalkan kembali cagar budaya Pura

Tirta Empul secara luas guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana.

"Marilah kita sama-sama ulurkan tangan, memasarkan Pura Tirta Empul kembali untuk mendapatkan kunjungan yang lebih banyak sekali," imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kunjungi-pura-tirta-empul-presiden-dorong-pemeliharaan-aset-kebudayaan-negara/>

“

Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga pada pemerintah daerah, ada income di sana

”



Hasil Sero Survei: 99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19

Budi menyebut bahwa saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi dan titer antibodi yang tinggi.





Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali melakukan penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei) beberapa waktu lalu untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi Covid-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen.

“Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi,” ujar Budi saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 18 April 2022, selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Kesehatan mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah melakukan Sero survei pada Desember 2021 lalu sekaligus pengukuran titer antibodi masyarakat. Budi menyebut bahwa saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi dan titer antibodi yang tinggi.

“Bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan, titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tetapi kadar antibodinya tinggi,” tuturnya.

Oleh karena itu, Budi melanjutkan, pemerintah meyakini bahwa tingginya titer antibodi masyarakat Indonesia dapat mengurangi risiko dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perjalanan mudik Lebaran.

“Sehingga kalau nanti diserang virus daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya, dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya, pemerintah, bahwa insyaallah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita,” lanjut Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengingatkan bahwa kegiatan menjelang Lebaran utamanya di tempat keramaian harus dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan atau di tempat keramaian ini dilakukan dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri,” ucap Airlangga.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/hasil-sero-survei-992-persen-masyarakat-indonesia-sudah-miliki-antibodi-covid-19/>

Implementasi ASO dan Manfaatnya Bagi Indonesia

Program migrasi televisi analog ke televisi digital atau yang selama ini dikenal dengan sebutan *Analog Switch Off* sebentar lagi akan memasuki tahap implementasinya. Sejak disahkannya UU No. 11 tahun 2020, Kementerian Kominfo telah menjalankan berbagai persiapan untuk melakukan migrasi televisi analog ke siaran televisi digital di Indonesia. Mulai dari sarana dan prasarana menyelenggarakan program *analog switch off* (ASO) seperti kesiapan lembaga penyiaran, sumber daya manusia (SDM), hingga ketersediaan piranti set top box (STB) bagi masyarakat tak mampu maupun secara komersial.

ASO diluncurkan secara resmi Agustus 2021. Sebagai pelaksana program, Kementerian Kominfo terus menjalin kolaborasi guna menyukseskan implementasi ASO. Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 November 2021 yang lalu, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, ada tiga aspek yang dipersiapkan dalam melakukan *analog switch off*.

"Pertama adalah di sektor lembaga penyiaran. Baik itu lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI dan LPP lokal, lembaga penyiaran swasta (LPS), serta lembaga penyiaran komunitas (LPK). Dari sisi lembaga penyiaran, ada dua hal yang harus



bisa disiapkan, yaitu yang pertama infrastruktur *multiplexing* (MUX)-nya selesai dibangun sesuai tahapan ASO," ujarnya.

Digital switch on broadcasting telah dimulai pada 31 Agustus tahun 2019 melalui siaran *simulcast* atau penyelenggaraan siaran televisi digital dan siaran televisi analog secara beriringan. Di Indonesia, penyelesaian tahapan ASO ditetapkan melalui Pasal 60 A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai pembaharuan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sesuai amanat UU Cipta Kerja, ASO akan diselesaikan dalam waktu dua tahun, sejak penetapan UU tersebut atau paling lambat 2 November 2022.

Menurut Menteri Johnny, jeda waktu satu setengah tahun memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga penyiaran untuk meningkatkan sistem menjadi sistem digital di studio dan kualitas SDM. "Agar mampu mengelola penyiaran digital," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran untuk mengatur waktu beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing, selama itu dilakukan dalam kurun waktu sebelum ASO.



Manfaat ASO

Setidaknya ada 4 poin penting manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program migrasi televisi analog ke televisi digital. Pertama, masyarakat dapat merasakan pengalaman menonton berbagai program televisi yang berbeda dari biasanya, seperti kualitas gambar yang bersih, jernih, canggih, dengan fitur yang sangat interaktif. Kedua, masyarakat bisa mengetahui informasi kebencanaan yang disampaikan secara realtime. Ketiga, masyarakat bisa mengalami kemudahan dalam mengakses internet 5G. Keempat, memperkuat rasa nasionalisme (khususnya di wilayah perbatasan).

Hal itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di berbagai pelosok di nusantara. Dengan begitu, akan terjadi pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh daerah. Dengan demikian, masyarakat di pelosok dapat mengakses siaran televisi yang diakses oleh masyarakat yang berada di kota.

Bagi pemerintah, ASO membawa efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi di Indonesia. Sisa frekuensi hasil kebijakan tersebut dapat dipergunakan untuk menggelar layanan akses telekomunikasi berkualitas seluler 5G yang sudah dimulai pada 2021.

Efisiensi yang dimaksud adalah penggunaan pita frekuensi yang diperuntukkan bagi seluruh stasiun televisi dapat dipangkas hingga mencapai 176 megahertz dari yang sebelumnya memakan pita frekuensi sebanyak 328 megahertz.

“Migrasi ke digital dari kebutuhan frekuensi yang tadinya mencapai 328 megahertz hanya dibutuhkan sebanyak 176 megahertz. Sisanya 112 megahertz dipergunakan sektor lainnya,” ungkap Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Geryantika Kurnia.

Pelaksanaan kebijakan ASO juga akan membuat sumber daya frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran televisi menjadi lebih efisien. Pada siaran digital, satu kanal frekuensi dapat dipergunakan oleh 12 lembaga penyiaran.

Kementerian Kominfo juga akan terus berkolaborasi dengan seluruh ekosistem penyiaran melakukan sosialisasi mengenai program digitalisasi penyiaran dan ASO. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan *above the line* melalui kerja sama dengan media-media nasional utama, *through the line* melalui media-media *online*, serta *below the line* dengan penempatan media luar ruangan aktivitas sosial lainnya.





ASO Tahap Pertama Siap 100 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dan akan terus menyukseskan program *Analog Switch Off* (ASO) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. UU tersebut mengamanatkan program ASO ditargetkan selesai di tanggal 2 November 2022.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyiapan berbagai kebutuhan lainnya dalam beberapa bulan terakhir membuktikan pemerintah dan masyarakat telah siap bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital.

Salah satu langkah yang disiapkan saat ini adalah aspek infrastruktur tahap pertama program ASO di tanggal 30 April 2022. Hal itu disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate pada awal tahun 2022, tepatnya di tanggal 18 Januari saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

“Untuk tahap satu ASO, seluruhnya infrastruktur telah selesai. Itu artinya nanti pada saat kita lakukan

migrasi analog ke digital, infrastrukturnya sudah siap,” kata Menteri Johnny.

Kesiapan aspek infrastruktur untuk ASO tahap pertama itu disampaikan juga oleh Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail pada 25 Februari 2022. Menurutnya, infrastruktur multipleksing dan siaran digital sudah siap di 56 wilayah layanan siaran yang mencakup 166 kabupaten dan kota sebagai lokasi implementasi tahap pertama.

Bahkan, pemerintah juga telah menyediakan bantuan *Set Top Box* (STB) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh daerah yang telah dijadwalkan ASO tahap pertama.

“Saat ini sudah terdapat siaran digital dan infrastruktur multipleksing yang dibutuhkan bagi setiap lembaga penyiaran untuk melakukan peralihan dari analog ke digital telah siap untuk mendukung ASO pada 30 April 2022 mendatang,” jelas Plt. Dirjen PPI.

Sedangkan untuk pemberian STB gratis kepada rumah tangga miskin, Kementerian Kominfo dan penyelenggara multipleksing membaginya dalam tiga tahap. Dari total 6,7 juta STB gratis itu, sebanyak 3,2 juta STB gratis akan dibagikan pada ASO tahap pertama.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang merinci total keseluruhan STB gratis pada ASO tahap pertama sebanyak 3.202.503 unit. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyediakan 87.310 unit, sedangkan lembaga penyiaran swasta dan penyelenggara multipleksing menyediakan sebanyak 3.115.193.

Stafsus Philip Gobang menjelaskan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate telah menunjuk PT. Pos Indonesia sebagai mitra pelaksana pendistribusian bantuan STB dari pemerintah untuk diserahkan kepada rumah tangga miskin yang telah terdaftar.

“Harapannya pendistribusian bantuan STB tahap pertama dapat dirasakan dan digunakan oleh rumah tangga miskin yang membutuhkan. Dan pada akhirnya, akses informasi dan edukasi dapat terus terjaga selama *Analog Switch Off* berlangsung. Masyarakat di wilayah layanan siaran yang masuk dalam tahap pertama terlebih dahulu bersiap memasuki dunia baru ASO atau siaran TV digital sejak hari ini,” jelasnya.

Stafsus Menkominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah, seluruh pihak, bahkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan *Analog Switch Off* sebagai salah satu program yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Harapannya pendistribusian bantuan STB tahap pertama dapat dirasakan dan digunakan oleh rumah tangga miskin yang membutuhkan. Dan pada akhirnya, akses informasi dan edukasi dapat terus terjaga selama Analog Switch Off berlangsung.

Sosialisasi dan Ujicoba STB

Selain menyiapkan infrastruktur multipleksing dan pembagian STB gratis kepada masyarakat, Kementerian Kominfo juga bergerak cepat melakukan sosialisasi dan ujicoba penggunaan STB di berbagai daerah seperti di Bali, Bengkulu, Tegal, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lainnya yang masuk dalam ASO tahap pertama.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan ujicoba STB, Stafsus Menkominfo Philip Gobang terus menekankan upaya pemerintah dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat agar bisa mengikuti perubahan global. Karena menurutnya, migrasi siaran TV analog ke TV digital merupakan amanat UU Cipta Kerja sehingga Kementerian Kominfo terus melaksanakan berbagai persiapan di lapangan agar tahapan migrasi ASO berjalan lancar.

“Semuanya dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengikuti perkembangan-perkembangan besar yang terjadi secara global. Dengan begitu, seluruh komponen masyarakat hingga ke pelosok tanah air beradaptasi mengikuti perubahan yang terjadi di seluruh dunia secara cepat,” ujarnya.

Atas nama Kementerian Kominfo dan Menkominfo Johnny G. Plate, Stafsus Philip Gobang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak yang telah menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan ujicoba STB gratis kepada masyarakat.

“Saya kira hal ini untuk mendorong kita semua untuk berperan dan bekerja sama dalam kolaborasi dan dalam sinergi yang sama untuk menampilkan kemajuan-kemajuan di masyarakat lokal agar tampil dengan kekhasan dan keunikannya,” tuturnya.

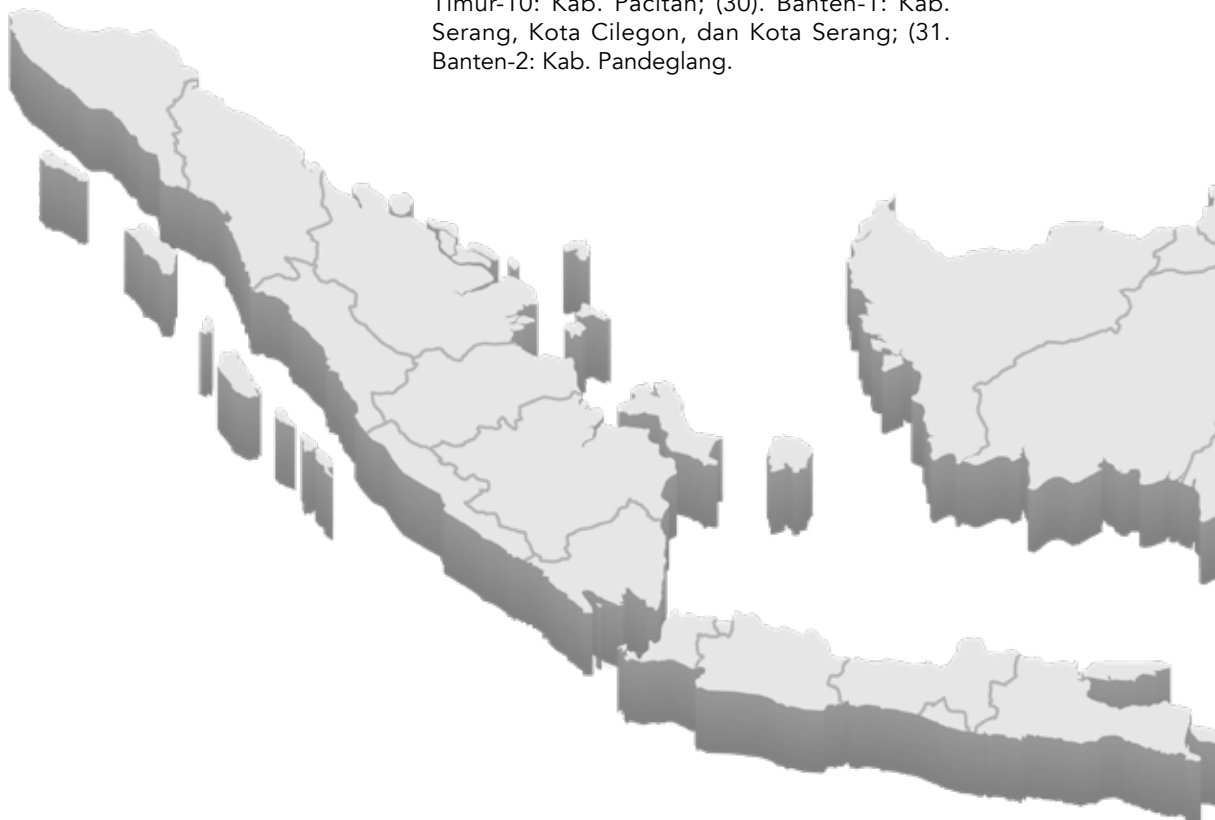
Wilayah Tahap 1

Dalam tahapan pertama, cakupan wilayah layanan siaran di 56 daerah dengan rincian: (1) Aceh-1: Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh; (2). Aceh-2: Kota Sabang; (3). Aceh-4: Kab. Pidie, Kab. Bireuen, dan Kab. Pidie Jaya; (4). Aceh-7: Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe; (5). Sumatera Utara-2: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjung Balai; (6). Sumatera Utara-5: Kab. Dairi dan Kab. Pakpak Bharat.

Kemudian, (7). Sumatra Barat-1: Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman; (8). Riau-1: Kab. Kampar dan Kota Pekanbaru; (9). Riau-4: Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; (10). Jambi-1: Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kab. Sarolangun; (11). Sumatera Selatan-1: Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, dan Kota Palembang; (12). Bengkulu-1: Kab. Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

(13). Lampung-1: Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; (14). Kepulauan Bangka Belitung-1: Kab. Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang; (15). Kepulauan Riau-1: Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang; (16). Jawa Barat-2: Kab. Garut; (17). Jawa Barat-3: Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, dan Kota Cirebon; (18). Jawa Barat-4: Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya; (19). Jawa Barat-7: Kab. Cianjur; (20). Jawa Barat-8: Kab. Majalengka dan Kab. Sumedang; (21). Jawa Tengah-2: Kab. Blora.

(22). Jawa Tengah-3: Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal; (23). Jawa Tengah-6: Kab. Rembang, Kab. Pati, dan Kab. Jepara; (24). Jawa Tengah-7: Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, dan Kab. Brebes; (25). Jawa Timur-3: Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep; (26). Jawa Timur-4: Kab. Lumajang, Kab. Jember, dan Kab. Bondowoso; (27). Jawa Timur-5: Kab. Situbondo; (28). Jawa Timur-6: Kab. Banyuwangi; (29). Jawa Timur-10: Kab. Pacitan; (30). Banten-1: Kab. Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang; (31). Banten-2: Kab. Pandeglang.

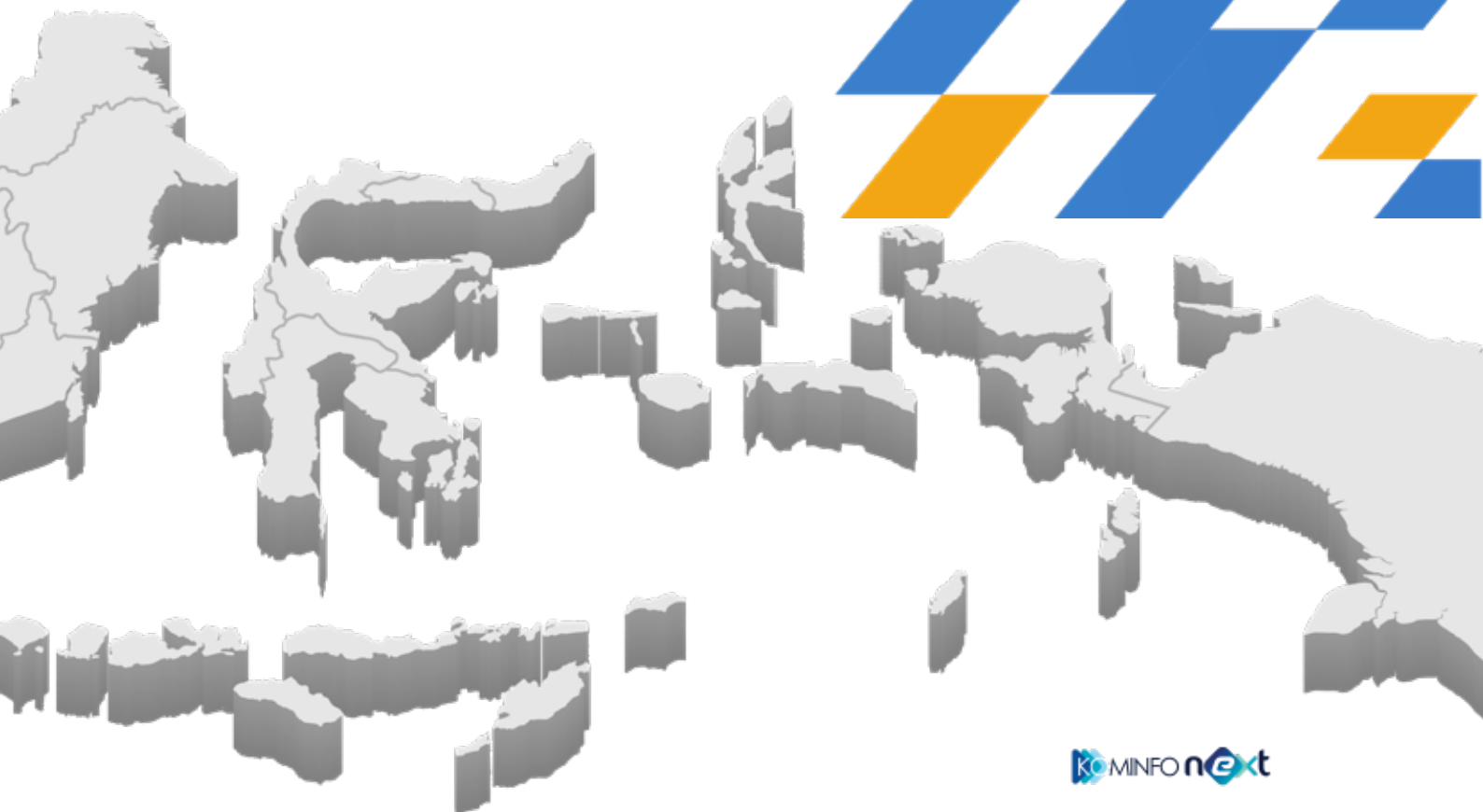


(32). Bali: Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, dan Kota Denpasar; (33). Nusa Tenggara Barat-1: Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, dan Kota Mataram; (34). Nusa Tenggara Timur-1: Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; (35). Nusa Tenggara Timur-3: Kab. Timor Tengah Utara; (36). Nusa Tenggara Timur-4: Kab. Belu dan Kab. Malaka; (37). Kalimantan Barat-1: Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, dan Kota Pontianak; (38). Kalimantan Selatan-2: Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, dan Kab. Balangan; (39). Kalimantan Selatan-3: Kab. Kotabaru.

(40). Kalimantan Selatan-4: Kab. Tabalong; (41). Kalimantan Tengah-1: Kab. Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya; (42). Kalimantan Timur-1: Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang; (43). Kalimantan Timur-2: Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan; (44). Kalimantan Utara-1: Kab. Bulungan dan Kota Tarakan; (45). Kalimantan Utara-3: Kab. Nunukan; (46). Sulawesi Utara-1: Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado,

Kota Bitung, dan Kota Tomohon; (47). Sulawesi Tengah-1: Kab. Sigi dan Kota Palu; (48). Sulawesi Selatan-1: Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, dan Kota Makassar; (49). Sulawesi Tenggara-1: Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Kepulauan, dan Kota Kendari.

Selanjutnya, (50). Gorontalo-1: Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, Kab. Boalemo; (51). Sulawesi Barat-1: Kab. Mamuju; (52). Maluku-1: Kab. Seram Bagian Barat dan Kota Ambon; (53). Maluku Utara-1: Kab. Halmahera Barat dan Kota Ternate; (54). Papua-1: Kab. Jayapura, Kab. Keerom, dan Kota Jayapura; (55). Papua Barat-1: Kab. Sorong dan Kota Sorong; dan (56). Papua Barat-2: Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, dan Kab. Pegunungan Arfak.



ASO dan *Digital Dividend*

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan atensi penuh pada pembangunan infrastruktur dalam mendorong ekonomi digital Indonesia. Salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pengembangan infrastruktur Indonesia adalah pengelolaan *digital dividend* frekuensi *band 700 MHz* yang selama ini digunakan dalam siaran analog.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyatakan, pemanfaatan *band 700 MHz* tersebut akan dioptimalkan untuk mengorkestrasi transformasi ekonomi digital.

Pemanfaatan *band 700 MHz* tersebut hanya akan bisa terwujud bila migrasi dari siaran analog ke digital bisa terjadi secara paripurna, melalui program *Analog Switch Off (ASO)*.

Menteri Johnny juga mengelaborasi bahwa ASO akan memberi dampak pada penghematan biaya operasional penyelenggara siaran televisi (TV) swasta, di mana TV swasta tidak perlu membangun infrastruktur besar, tetapi bisa menggunakan sistem sewa dengan penyelenggara siaran wilayah siaran yang dimaksud.

ASO juga membuka peluang bagi kanal-kanal lokal serta TV komunitas untuk bisa bertumbuh dan berkembang.

Selain itu, Menkominfo Johnny G. Plate pun menekankan aspek kecepatan internet yang mampu membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia di tengah persaingan global.

Menkominfo juga menambahkan, sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sangat kaya. Kekayaan tersebut, jika tidak didukung dengan sarana telekomunikasi yang cepat, akan memberikan ketimpangan antara wilayah yang satu dan lainnya.



Untuk itu Menteri Johnny berharap, masyarakat terus berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama lintas *stakeholder* demi kemajuan digital Indonesia. Khususnya percepatan transformasi TV analog ke TV digital yang mulai digulirkan tahap pertama pada tanggal 30 April 2022.

Program *Analog Switch Off (ASO)* dapat menghemat ruang frekuensi. Saat migrasi ke TV Digital akan terjadi efisiensi dan optimalisasi frekuensi. Selain menumbuhkan industri konten lokal yang edukatif.

Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran ini di antaranya adalah banyak kanal siaran dalam jumlah yang lebih banyak.

Migrasi TV digital tidak hanya sebatas tuntutan perkembangan global, tetapi program ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, karena kanal siaran dengan jumlah lebih banyak dan infrastruktur penyiaran seperti pemancar, antena, dan saluran transmisi mampu melahirkan banyak program.

Melanjutkan penyampaian Menteri Koinfo, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang mengatakan migrasi TV digital akan membuka peluang bagi tumbuh kembangnya konten-konten lokal yang edukatif. Karena bila selama ini satu frekuensi hanya bisa dipakai untuk satu kanal, melalui migrasi ke siaran digital satu frekuensi bisa dipakai untuk mentransmisikan banyak siaran.

Philip Gobang juga mengatakan dampak positif lain dari migrasi TV digital adalah munculnya kanal TV baru.

Ia juga mengatakan tatanan baru ini akan melahirkan insan-insan kreatif lokal. Di mana anak muda akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi konten kreator.

Selain pertumbuhan konten lokal, migrasi TV digital juga mampu menstabilkan jaringan internet yang selama ini masih menjadi kendala di beberapa daerah, bahkan bisa memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pengimplementasian 5G.





Era Baru Siaran TV Digital: Indonesia Menghentikan Siaran TV Analog

Oleh: **Dr. Rosarita Niken Widiastuti**

Door Duisternis tot Licht secara resmi diterbitkan pada 1911 mewarnai babak baru

Sejarah bangsa Indonesia; sejarah pergerakan bangsa Indonesia keluar dari kondisi terpuruk. Buku yang memuat surat-surat Raden Ajeng (R.A.) Kartini pada periode 1899 hingga 1904 itu dikumpulkan dan diterbitkan dalam bahasa Belanda oleh Abendanon, sahabat pena sang penulis. Yang kemudian oleh Armijn Pane diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran pada 1922. Buku yang penuh semangat pembaruan itu *sine qua non* untuk menyongsong kemajuan di masa depan.

Persis, seratus tahun lebih kemudian, kita akan menatap babak baru sejarah; menuju transformasi digital di Indonesia. Gelombang disruptsi digital diikuti dengan proses transformasi digital yang dilakukan oleh segenap sektor publik dan privat. Khususnya di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Transformasi digital merupakan suatu proses dan strategi perubahan organisasi yang direncanakan secara strategis untuk mendominasi



atau tetap relevan melalui pemanfaatan teknologi digital. Bagi sektor privat atau industri bisnis, proses transformasi digital akan menguatkan posisi dan daya tawar di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Sedangkan bagi sektor organisasi pemerintahan, transformasi digital dilakukan untuk memberikan dampak terhadap pelayanan publik agar lebih efektif dan memuaskan masyarakat.

Salah satu proses transformasi digital yang sedang dicanangkan oleh pemerintah—bersama dengan *stakeholder* terkait, adalah digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran atau penghentian siaran TV Analog (Analog Switch Off/ASO) merupakan wujud dari transformasi digital dalam ruang tata kelola penyiaran. Hal itu sebagaimana yang telah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A. Dasar hukum tersebut dibangun

atas dasar kondisi penyiaran di Indonesia. Dari segi infrastruktur penyiaran, Indonesia sangat tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran secara global. Padahal berbagai negara telah mematikan siaran TV Analog.

Misalnya, International Telecommunication Union (ITU) dalam konferensi ITU 2006, telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region-1 menuntaskan ASO paling lambat 2015. Demikian pula pada konferensi ITU 2007 dan 2012, pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz) semula untuk televisi terestrial ditetapkan menjadi layanan mobile broadband. Sedangkan di tingkat regional terdapat Deklarasi ASEAN untuk menuntaskan ASO di 2020. Negara seperti Brunei Darussalam sudah menerapkan ASO di 2017 untuk wilayah perbatasannya demi menghindari interferensi. Disusul Singapura dan Malaysia 2019, di 2020 Vietnam, Thailand dan Myanmar telah menyelesaikan ASO. Sementara itu, Indonesia saat ini sedang melaksanakan program peralihan ke TV Digital dengan batas akhir 2 November 2022.

Sebagai tindak lanjut atas amanat UU Cipta Kerja tersebut, pelaksanaan *Analog Switch Off* dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga atau paling akhir 2 November 2022. Tahapan ASO itu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PM No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Siaran Penghentian Siaran TV Analog mencakup total 112 Wilayah Layanan (341 Kabupaten/Kota).

Perlu diketahui, terdapat 5 (lima) urgensi bagi Indonesia untuk segera melaksanakan penghentian Siaran TV Analog. **Pertama**, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia terlambat dalam digitalisasi TV sistem terestrial dibanding negara lain. **Kedua**, siaran TV Analog bersifat boros yang memakan banyak spektrum frekuensi 700 Mhz. Spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk siaran TV Analog berada pada pita 700 Mhz atau pita yang juga digunakan untuk layanan internet. Peralihan dari analog ke digital dilakukan untuk efisiensi penggunaan frekuensi yang merupakan

sumber daya alam terbatas. Jika sebelumnya 1 (satu) kanal stasiun TV Analog membutuhkan 1 (satu) frekuensi. Nantinya pada sistem siaran TV Digital, 1 (satu) frekuensi mampu menampung 6 sampai 12 stasiun TV secara bersama-sama melalui sistem siaran multipleksing.

Ketiga, jika bermigrasi ke TV Digital, Indonesia memiliki frekuensi tersisa/dividen digital sebesar 112 Mhz. Penghematan spektrum tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan internet, peningkatan teknologi 5G, peringatan dini bencana, ekonomi digital, pendidikan dan kesehatan. **Keempat**, peralihan ke siaran TV Digital akan menciptakan pemerataan siaran televisi yang berkualitas di seluruh pelosok daerah. Salah satu keunggulan siaran TV Digital yaitu tersedianya kualitas saluran siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan (interferensi, suara dan/atau gambar rusak, berbayang, dan lain-lain). **Kelima**, migrasi siaran TV Analog ke siaran TV Digital diperkirakan menumbuhkan 232.000 lapangan pekerjaan baru (Boston Consulting Group, November 2017).

Pada dasarnya, migrasi siaran TV analog ke digital tetap siaran gratis atau Free To Air (FTA) yang ditonton oleh masyarakat saat ini. Perubahan hanya terdapat pada format tayangan digital. Siaran digital tersebut dapat diakses, baik melalui perangkat televisi analog maupun televisi digital, dengan catatan perangkat televisi analog harus dilengkapi dengan alat bantu *set-top-box* (STB). Perangkat STB itu dibutuhkan untuk menangkap siaran TV Digital yang menggunakan teknologi Digital Video Broadcasting–Terrestrial Second Generation (DVB-T2). Artinya, TV lama yang berbentuk tabung pun masih bisa digunakan dengan dibantu perangkat STB. Dan sebelum menggunakan STB, masyarakat perlu cermat memilih dan memilah *set-top-box*. Khususnya, perangkat *set-top-box* yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Di samping itu, sebelum menggunakan STB, kita juga perlu untuk terlebih dahulu mengecek sinyal siaran TV Digital di lokasi tempat tinggal.



Keberadaan STB merupakan prasyarat teknis bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran TV Digital. Perangkat ini merupakan wujud dari kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam menikmati siaran berkualitas. Pemerintah bersama dengan ekosistem penyiaran telah menyiapkan mekanisme penyediaan dan distribusi STB bagi masyarakat yang membutuhkan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), penyelenggara multiplexing bertanggung jawab untuk menyediakan *set-top-box* secara gratis kepada rumah tangga miskin (RTM). Pemerintah pun akan turut andil dalam proses distribusi STB.

Tentunya, seluruh pesan dan informasi terkait migrasi televisi analog menuju digital harus disampaikan kepada masyarakat. Hal itu mulai dari regulasi, teknis/cara mendapatkan siaran TV Digital, infrastruktur, urgensi hingga kebermanfaatannya untuk publik harus mampu menyentuh level kesadaran masyarakat yang imanen. Melalui sejumlah agenda sosialisasi pemerintah senantiasa mengajak serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna menyukseskan program penghentian siaran TV Analog.

Seperti yang telah diketahui, sosialisasi merupakan satu dari empat pilar penting dalam melaksanakan penghentian siaran TV Analog.¹Penyebaran informasi kepada masyarakat merupakan upaya untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik untuk secara bersama-sama bersiap beralih dari siaran TV Analog ke siaran TV Digital. Maka, seluruh instrumen komunikasi publik layak dimanfaatkan dan diberdayakan semaksimal mungkin.

Seperangkat instrumen komunikasi publik dirancang secara strategis dan terorganisir agar mampu menyentuh ingatan kolektif masyarakat. Hal itu termasuk dengan mengantisipasi mispersepsi



yang mungkin saja terjadi di masyarakat. Sehingga, tercipta perubahan perilaku, khususnya dalam menonton tayangan televisi. Perubahan perilaku yang dilakukan melalui komunikasi publik harus dilaksanakan secara intensif dan simultan memanfaatkan seluruh medium.

Adapun serangkaian kegiatan komunikasi pesan terkait dimediasi dalam pelbagai saluran seperti; pemanfaatan media baru (berbasis teknologi digital), pelibatan influencer, rilis pers, media luar ruang, pertunjukan rakyat, webinar, dialog publik, hingga perlombaan. Seluruh instrumen itu dijalankan secara kolaboratif multi-aktor dan multi-platform, mulai dari lembaga penyiaran televisi dan radio hingga kanalisasi pesan melalui produk budaya populer, seperti animasi dan *jingle*. Juga, pelibatan agen sosialisasi dengan modal sosial kuat yang dapat menarik perhatian publik. Hal itu dilakukan agar masyarakat semakin siap untuk beralih ke siaran TV Digital.



Tentunya, sinergisitas dan kolaborasi sangat diperlukan sebagai bagian dari kesuksesan program penghentian Siaran TV Analog. Program Penghentian Siaran TV Analog merupakan upaya berskala nasional dan turut melibatkan rantai ekonomi lintas industri, mulai dari penyiaran, elektronik, perdagangan, media sampai dengan telekomunikasi dan ekonomi digital. Keterlibatan multi-stakeholder ini selain telah menjadi konsensus yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, juga merupakan keniscayaan dalam proses transformasi digital.

Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa transformasi digital merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dan perlu dikawal bersama. Sebagai sebuah jalan sejarah yang sudah pasti terjadi (keniscayaan), proses transformasi digital perlu dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan persiapan matang. Dan, dalam hitungan hari, tahap pertama penghentian siaran TV Analog (Analog Switch/ASO) akan segera dilaksanakan. Tentu, proses diseminasi dan amplifikasi dalam agenda komunikasi publik akan senantiasa dilakukan agar proses transformasi digital berjalan dengan baik. Dalam suasana bulan Kartini ini, tidak ada salahnya kita membawa semangat habis siaran TV Analog, terbitlah siaran TV Digital.

endnote

¹ Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 72 angka 8, sisipan Pasal 60 A, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, setidaknya empat pilar utama yang harus dibangun untuk mempersiapkan ASO. Pertama, multipleksing adalah infrastruktur utama dalam penyiaran digital. Kedua, setiap lembaga penyiaran mulai melakukan siaran *simulcast* yaitu Siaran TV Digital tanpa mengakhiri Siaran TV Analog untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari Siaran TV Digital. Ketiga, untuk dapat menerima Siaran TV Digital tidak hanya dibutuhkan perangkat televisi digital, akan tetapi juga perangkat penerima Siaran TV Digital, yakni, *set-top-box*/STB (STB). Keempat, sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton Siaran TV Digital.

Wilayah Penghentian Siaran Analog

Tahap 1

30 April 2022



Jadwal Penghentian Tahap 1 - 3

Aceh

Kab. Aceh Besar
Kota Bandar Aceh
Kota Sabang
Kab. Pidie
Kab. Bireun
Kab. Pidie Jaya
Kab. Aceh Utara
Kota Lhokseumawe

Sumatera Utara

Kab. Karo
Kab. Simalungun
Kab. Asahan
Kab. Batu Bara
Kota Pematang Siantar
Kota Tanjung Balal
Kab. Dairi
Kab. Pakpak Barat

Sumatera Barat

Kab. Solok
Kota Pariaman
Kab. Sijunjung
Kab. Tanah Datar
Kab. Padang Pariaman
Kota Padang
Kab. Agam
Kota Solok
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Bukittinggi

Riau

Kab. Kampar
Kota Pekanbaru
Kab. Bengkalis
Kab. Kepulauan Meranti
Kota Dumai

Jambi

Kab. Batanghari
Kab. Muaro Jambi
Kota Jambi
Kab. Sarolangun



Sumatera Selatan

Kota Palembang
Kab. Ogan Komering ilir
Kab. Banyuasin
Kab. Ogan Ilir

Bengkulu

Kab. Bengkulu Tengah
Kota Bengkulu

Lampung

Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Timur
Kab. Pesawaran
Kab. Pringsewu
Kota Bandar Lampung
Kota Metro

Kepulauan Bangka Belitung

Kota Pangkal Pinang

Kepulauan Riau

Kab. Bintan
Kab. Karimun
Kota Batam
Kota Padang Panjang

**Jawa Barat**

Kab. Garut
Kab. Cirebon
Kab. Kuningan
Kota Cirebon
Kab. Ciamis
Kab. Pangandaran
Kab. Tasikmalaya
Kota Banjar
Kota Tasikmalaya
Kab. Cianjur
Kab. Majalengka
Kab. Sumedang

Jawa Tengah

Kab. Blora
Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Tegal
Kota Pekalongan
Kota Tegal
Kab. Rembang
Kab. Pati
Kab. Jepara
Kab. Cilacap
Kab. Banyumas
Kab. Purbalingga
Kab. Brebes

Jawa Timur

Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
Kab. Lumajang
Kab. Jember
Kab. Bondowoso
Kab. Banyuwangi
Kab. Pacitan

Banten

Kab. Serang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kab. Pandeglang

Bali

Kab. Jembrana
Kab. Tabanan
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Klungkung
Kab. Bangli
Kab. Karangasem
Kab. Buleleng
Kota Denpasar

Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kota Mataram

Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang
Kota Kupang
Kab. Timor Tengah Utara
Kab. Belu
Kab. Malaka

**Kalimantan Tengah**

Kab. Pulang Pisau
Kota Palangkaraya

Kalimantan Timur

Kab. Kutai Kartanegara
Kota Samarinda
Kota Bontang
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan

Kalimantan Utara

Kab. Bulungan
Kota Tarakan
Kab. Nunukan

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Utara
Kota Manado
Kota Bitung
Kota Tomohon

Sulawesi Tengah

Kab. Sigi
Kota Palu

Sulawesi Selatan

Kab. Gowa
Kab. Maros
Kab. Pangkajene Kepulauan
Kota Makassar
Kab. Takalar

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Konawe Kepulauan
Kota Kendari

Gorontalo

Kab. Gorontalo
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
Kota Gorontalo
Kab. Boalemo

Sulawesi Barat

Kab. Mamuju

Maluku

Kab. Seram Bagian Barat
Kota Ambon

Maluku Utara

Kab. Halmahera Barat
Kota Ternate

Papua

Kab. Jayapura
Kab. Keerom
Kota Jayapura

Papua Barat

Kab. Sorong
Kota Sorong
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Pegunungan Arfak

Kalimantan Barat

Kab. Mempawah
Kab. Kubu Raya
Kota Pontianak

Kalimantan Selatan

Kab. Tapin
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Balangan
Kab. Kotabaru
Kab. Tabalong





DBS untuk 113 Wilayah Tak Terjaring ASO

Tahun 2022 akan menjadi catatan sejarah penting bagi Indonesia setelah penantian panjang untuk dapat bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Melalui program *Analog Switch Off (ASO)*, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab tantangan dalam bermigrasi ke layanan digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus pada sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran (Postelsiar). Pemerintah menargetkan program ASO atau layanan TV analog dimatikan secara total pada tanggal 2 November 2020. Artinya, di akhir tahun 2022 ini Indonesia telah menorehkan sejarah baru dalam transformasi digital nasional.

Menindaklanjuti amanat UU 11/2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara teknis program ASO telah membagikan tiga tahapan ASO yang meliputi tahap pertama pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten dan kota, tahap kedua dilaksanakan paling lambat 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran di 110 kabupaten dan kota, dan tahap ketiga pada 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran di 65 kabupaten dan kota.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, melalui tiga tahapan tersebut maka terdapat total ada 112 wilayah layanan siaran di 341 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah implementasi ASO dari total 225 wilayah layanan siaran.

Jika 112 dari 225 wilayah layanan siaran yang masuk dalam implementasi program ASO, bagaimana dengan 113 wilayah layanan siaran di 173 kabupaten/kota lainnya?

Menteri Johnny dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa untuk wilayah yang tidak tercakup ASO akan didorong menggunakan *digitalization broadcasting system* (DBS). Oleh karena itu, 113 wilayah siaran di 173 kabupaten dan kota didorong untuk berlangganan siaran televisi kabel berbayar.

“Namun demikian, pemerintah terus mendorong agar infrastruktur siaran digital TVRI tersedia di seluruh wilayah tanah air. Sebab, mulai 22 November 2022 sudah tidak ada lagi penyiaran televisi analog,” demikian ditegaskan Menteri Johnny.

Lantas, apa itu layanan DBS? Bagi masyarakat yang berada di 113 wilayah layanan siaran yang tidak termasuk implementasi ASO harus menggunakan antena parabola atau melakukan TV berlangganan. Karena selama tidak ada televisi terestrial, wilayah yang masuk daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) di sejumlah kabupaten/kota nantinya akan menjadi sasaran *Digitalization Broadcasting System*.



Khusus untuk 112 wilayah layanan siaran yang menjadi target ASO di seluruh Indonesia, Kementerian Kominfo mencatat terdapat 90 wilayah atau sebanyak 80,63 persen telah memiliki infrastruktur multipleksing dengan jumlah yang memadai untuk implementasi ASO.

Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan untuk daerah yang masuk dalam implementasi ASO tahap pertama, persentase kesiapan infrastruktur multipleksing sudah 100 persen. Artinya, jumlah minimal slot multipleksing yang dibutuhkan untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog telah tersedia.



Sementara itu, per Januari 2022, Kementerian Kominfo telah mencatat terdapat 291 lembaga penyiaran atau 41,75 persen dari total lembaga penyiaran yang sudah menyediakan siaran secara digital. Sedangkan untuk 406 lembaga penyiaran lainnya akan menyusul dan harus melakukan peralihan ke siaran digital sebelum setiap tahapan ASO yang telah ditentukan.

Untuk diketahui, pemerintah sebenarnya telah memulai tahapan implementasi siaran televisi digital sejak Agustus 2019. Namun pada tahun 2022 diperkuat dengan menerapkan *analog switch off* (ASO) secara penuh. Maka dengan demikian, terdapat 341 kabupaten/kota yang mengalami perpindahan dari siaran tv analog menjadi digital.

Seperti diketahui bersama bahwa migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital ibarat peralihan dari penggunaan TV hitam putih atau *black and white* ke TV berwarna (*colour*) di era 1980-an silam.

Di Indonesia, saat ini mayoritas siaran TV masih menggunakan sistem analog sehingga kualitas gambar yang dihasilkan tidak maksimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat atau pemirsa merasakan suara dan gambar yang tidak jernih jika tidak mendapat sinyal yang baik, hal tersebut kerap terjadi ketika lokasi TV jauh dari stasiun pemancar TV.

Oleh karena itu, hanya ada dua alasan atas urgensinya dilakukan migrasi siaran TV ke digital. Pertama, kepentingan publik memperoleh siaran berkualitas dan kedua efisiensi penggunaan frekuensi.

Melalui ASO Menuju Asa Indonesia Digital

Oleh: JH Phillip Gobang

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik





Perubahan adalah keniscayaan. Itulah prinsip dasar kehidupan yang terus bergulir dalam garis waktu. Keniscayaan dari perubahan senantiasa terejawantah dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya revolusi industri dari 1.0 hingga paling tidak saat ini dunia tengah memasuki era industri 5.0.

Di Indonesia, perkembangan teknologi terus diikhtirakan oleh pemerintah dalam sinergitas dengan multipihak. Transformasi digital kemudian menjadi bagian penting dan santer digaungkan selama beberapa tahun terakhir ini.

Salah satu item penting dari geliat transformasi digital Indonesia saat ini adalah dimulainya program implementasi *Analog Switch Off* (ASO). Program ASO ditandai oleh penghentian siaran televisi analog untuk kemudian dialihkan ke siaran televisi berbasis digital, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Pada tanggal 30 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai lembaga negara yang membidangi sektor transformasi digital secara resmi memulai program ASO tahap pertama.

Sukses program tersebut tentunya tidak dapat dilepas-pisahkan dari berbagai tantangan yang dihadapi. Sehingga untuk meminimalkan

dampak atas tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja maksimal dalam rangka mengkonsolidasikan dan memperkuat koordinasi yang masif berikut secara berkala.

Kementerian Kominfo sendiri membagikan program ASO dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama tanggal 30 April 2022, tahap kedua tanggal 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga tanggal 2 November 2022. Ini artinya, tahap pertama yang telah berlangsung merupakan penanda bahwa pemerintah sangat serius dalam untuk mengimplementasikan program ASO ke seluruh wilayah Indonesia.

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Pelaksanaan ASO Tahap 1 di Delapan Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan secara virtual tanggal 1 Mei 2022 lalu, menegaskan secara saksama tentang komitmen Kementerian Kominfo dalam melakukan monitoring dan koordinasi dengan berbagai pihak secara *sustainable*, agar pelaksanaan ASO bisa memberi dampak yang signifikan bagi dunia penyiaran Indonesia dan membawa benefit bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Johnny G. Plate pun terus bekerja dalam satu koordinasi guna mengatasi berbagai permasalahan di lapangan, termasuk dalam hal distribusi set *top box* (STB).

Kementerian Kominfo pun memonitor dari waktu ke waktu agar ASO tahap pertama di beberapa wilayah siar menjadi contoh dan awal yang baik ke depannya.

Melalui ASO, akan ada lebih dari 600 kanal siaran televisi di Indonesia, baik kanal siaran dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Komunitas-komunitas, hingga membuka peluang bagi tumbuh kembangnya konten-konten lokal dan segmentasi.

Oleh karena itu, Menkominfo Johnny G. Plate terus mendorong penyelenggara siaran televisi di Indonesia dapat segera bergabung dalam siaran digital agar bisa memudahkan masyarakat menikmati siaran digital.

Lebih dari itu, suksesi ASO akan menghasilkan penghematan ruang frekuensi. Sehingga pemanfaatan *band* 700 MHz akan dioptimalkan untuk mengorkestrasi transformasi ekonomi digital.

Tentunya pemanfaatan *band* 700 MHz tersebut hanya akan bisa terwujud bila migrasi dari siaran analog ke digital bisa terjadi secara paripurna, melalui program ASO.

Saat ini Kementerian Kominfo tengah melakukan *review* terhadap 8 wilayah siaran yang telah dihentikan siaran televisi analog.



Adapun 8 wilayah tersebut antara wilayah Riau-4 yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Pada wilayah tersebut, masyarakat yang semula hanya dapat menonton siaran analog TVRI lokal dan TV Bengkalis, kini juga dapat menonton TVRI Nasional, TVRI World dan TVRI Sports.

Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Timur-3 yang mencakup Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Malaka yang sebelumnya juga hanya bisa menyaksikan TVRI lokal dan LPP Pin Mobo TV, saat ini dapat menyaksikan siaran TVRI Nasional, TVRI World dan TVRI Sports. Berikutnya untuk wilayah Papua Barat-1 yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Sorong juga demikian yang sebelumnya hanya menyaksikan siaran analog TVRI Analog dan Kompas TV, kini bertambah siaran TVRI Nasional, TVRI World dan TVRI Sports.

Dari 8 wilayah yang terlebih dahulu telah memulai penghentian siaran televisi analog dan menyaksikan beberapa kanal siaran nasional menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyukseskan program ASO. Pada prinsipnya, di tanggal 2 November 2022 nanti yang merupakan tahap ketiga, menjadi akhir rangkaian tahapan ASO dan menjadi awal dimulainya siaran televisi digital di Indonesia.

Tentunya sebagai bangsa yang besar dengan populasi penduduk terbanyak serta penetrasi pengguna platform digital terbesar di dunia, program ASO adalah sebuah keniscayaan. Ketika masyarakat sudah mulai bermigrasi dari siaran televisi analog ke digital, maka kesiapan kita menuju bangsa digital yang maju akan terwujud.



Migrasi Siaran TV Analog ke Digital:

Batam dan Tegal di Ambang
Digital Dividend

Oleh: VNP/Tim Komunikasi Publik ASO

“

**Kota Batam
dan Kota Tegal
sepenuhnya masuk
era TV digital**

”



Ungkapan digitalisasi di penyiaran adalah keniscayaan sekarang bukan lagi jargon. Penyelesaian migrasi siaran TV analog ke digital sangat ditunggu karena penggunaan frekuensi *digital dividend* di pita frekuensi 700 MHz yang digunakan untuk siaran TV analog sangat dibutuhkan untuk peningkatan akses internet. Kota Batam dan Kota Tegal contoh nyata kesiapan siaran televisi digital di Indonesia.

Eloknya lagi, peralihan ke siaran TV digital memberikan manfaat yang langsung pada masyarakat. Semua kalangan masyarakat mengacungi jempol atas kualitas tayangan di siaran TV digital yang jauh berbeda dengan TV analog.

Daryono, salah seorang warga di Margadana, Kota Tegal, mengisahkan pengalamannya saat pertama kali beralih ke siaran TV digital. "Waktu siaran analog ditonton susah banget. Kadang ada gambar suara gak jelas, suara jelas gambarnya ada bintik-bintik semut. Kalau sekarang ada TV digital ya alhamdulillah, kayak aku beli TV baru. Bedanya jauh sekali antara (siaran) TV analog dengan TV digital," kata Daryono saat ditemui dalam Survei Kesiapan Masyarakat Menyambut Siaran TV Digital di Kota Tegal, Jawa Tengah, pertengahan Maret 2022 yang lalu.

Kota Tegal merupakan satu dari 38 kota/kabupaten di pulau Jawa yang masuk ASO (Analog Switch Off/penghentian siaran TV analog) tahap pertama. Persisnya, saat ASO tahap pertama pada 30 April 2022 mendatang, secara serentak 56 wilayah layanan di 166 kabupaten/kota tidak lagi menikmati siaran TV analog.

Sebagaimana sudah banyak diinformasikan ke masyarakat, proses ASO berlangsung secara bertahap.

"Dalam Peraturan Menteri Kominfo No.6 tahun 2021 (yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/2021) tentang Penyelenggaraan Penyiaran, di dalamnya terdapat pengaturan tahapan penghentian siaran televisi analog. Tahap pertama, 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga sekaligus terakhir 2 November 2022," ungkap Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti dalam sebuah webinar bertema "Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Analog Switch Off (ASO)", pada akhir tahun lalu.

Dalam setiap tahapan, hal yang perlu dicermati adalah kesiapan empat pilar penopang jalannya ASO. Hal tersebut adalah infrastruktur multipleksing, kesiapan lembaga penyiaran beralih ke sistem siaran digital, warga dan perangkat pendukung penerimaan siaran TV digital, serta tingkat kemauan beralih warga telah padu berjalan. Keempat pilar tersebut telah berdiri dengan utuh di Kota Tegal dan Kota Batam.

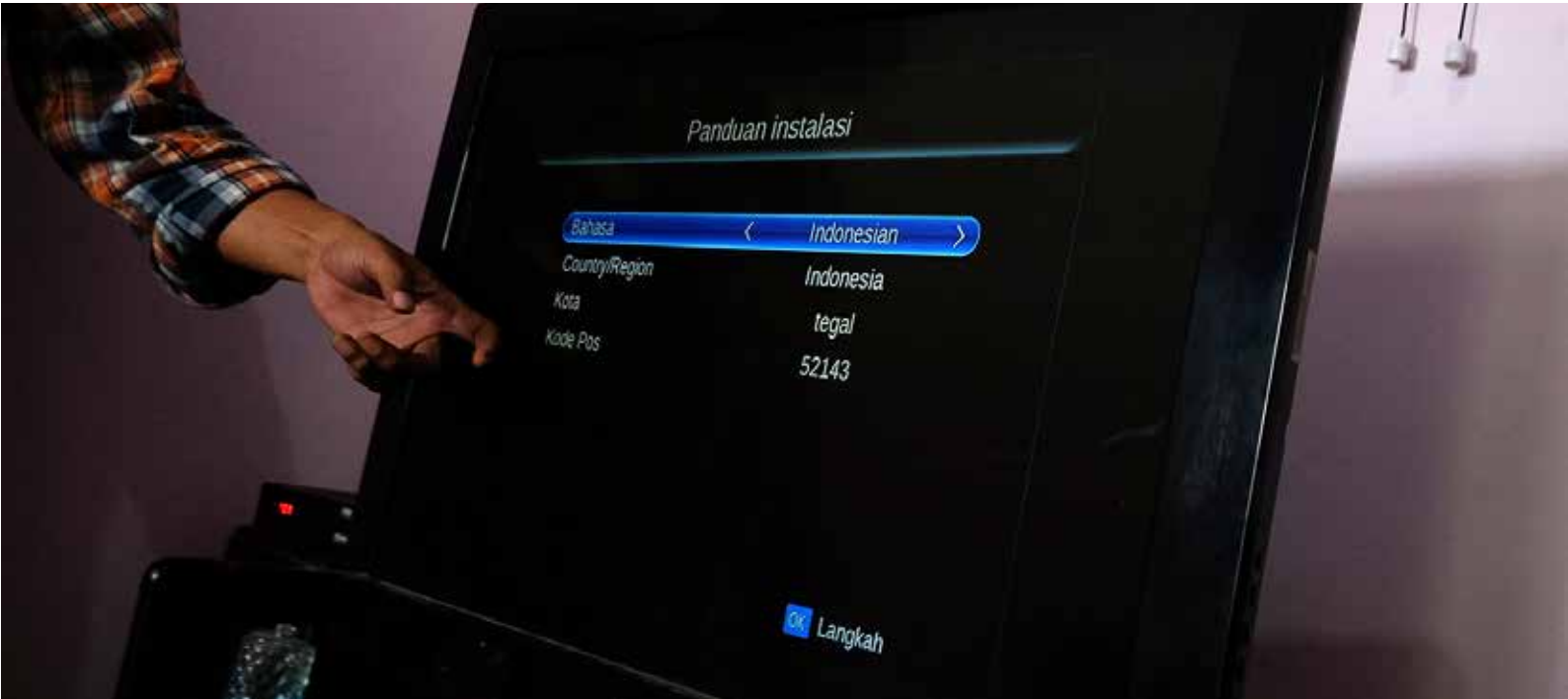
Khusus untuk Kota Tegal ada juga bonus-bonus kesiapan, yaitu, tidak hanya lembaga penyiaran baik publik maupun swasta yang telah siap, tetapi lokal serta komunitas telah benar-benar masuk ke era penyiaran TV Digital.

"Dulu, Batik TV sebagai TV komunitas memiliki jangkauan siaran analog yang terbatas di area Pekalongan. Tapi sekarang dengan menggunakan multipleksing siaran digital, maka siarannya ikut menjangkau sampai ke Kota Tegal dan sekitarnya karena Pekalongan dan Tegal berada di *service area* atau wilayah layanan yang sama," kata Sekretaris Gugus Tugas ASO Kemenkominfo Haryu Kresno saat menggambarkan kesiapan Kota Tegal.

Dengan demikian, di Kota Tegal hadir siaran dari delapan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yaitu Net TV Tegal, Trans TV Tegal, RTV Tegal, Kompas TV Pekalongan, Metro TV Aceh, UB ONTV, TV One, GTV Tegal, dan satu lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) yaitu Batik TV Pekalongan. Semua siaran tersebut dilayani oleh enam penyelenggara multipleksing, yaitu TVRI, Trans TV, Indosiar, Metro TV, TV One, dan GTV.

Dengan hadir secara lengkap keempat pilar tersebut, tidak mengherankan bila siaran TV digital sudah diterima dengan baik warga di Kota Tegal. Salah satunya Daryono, warga Kota Tegal terlihat girang karena TV analog di rumahnya kini bisa menangkap siaran TV digital.

"Tadinya banyak yang *ngeledak* saya, TV udah jelek kok masih dipakai, tidak ikut zaman. Tapi kalau sekarang, gak usah beli TV baru lagi. (Apalagi) harga STB ini untuk kaum menengah ke bawah, tidak keberatan. Sebanding dengan hasil yang kita lihat. Memuaskan lah," katanya sambil mengacungkan jempol.



Kota Batam Juga Siap 100 persen

Mirip dengan Kota Tegal, Kota Batam juga 100 persen siap memasuki siaran TV digital. Kesiapan Kota Batam penting karena letaknya berada di perbatasan dengan negara tetangga.

Kota Batam merupakan salah satu dari tiga kota setelah Jakarta dan Surabaya yang merasakan siaran televisi digital sejak tahun 2010. Sejak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang memerintahkan penyelesaian proses migrasi siaran TV analog ke digital, persiapan di Kota Batam juga tidak lepas dari usaha menguatkan kehadiran penyiaran di perbatasan secara maksimal.

Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi prioritas peralihan salah satunya terkait interferensi (luberan) frekuensi penyiaran dengan penggunaan di kedua negara tersebut.

Migrasi ke siaran TV digital langsung menyelesaikan persoalan luberan frekuensi tersebut. Dengan kata lain, siaran TV digital mendorong sepenuhnya penguatan rasa satu kesatuan di NKRI. Siaran negara tetangga yang sebelumnya masuk ke wilayah perbatasan Indonesia akan tertangkal dengan sendirinya.

Lebih jauh, kesiapan Kota Batam tercermin dari penjelasan Ketua KPID Kepulauan Riau Hengky Mohari dalam sebuah acara sosialisasi ASO melalui Pertunjukan Rakyat Celoteh Melayu Pak Mad Pantun secara daring, Kamis (7/04/2022).

“Kita di Kota Batam diuntungkan karena berada di perbatasan. Dan ini menjadi fokus pemerintah sejak lama. Sejak 2019, siaran televisi di Kota Batam sudah *simulcast* (siaran TV analog dan TV digital berjalan bersamaan). TV Lokal kita sudah siap. Dari 10 eksisting analog, mereka sudah mulai bermigrasi ke digital. Bahkan yang (stasiun TV) baru juga muncul. Sekarang yang bisa ditonton di empat wilayah ini (Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang; red.) ada 23 siaran TV digital,” kata Hengky.

Sebagaimana penjelasan Hengky di atas, terlihat bahwa di Kota Batam terjadi keragaman konten, keragaman kepemilikan, dan kesiapan infrastruktur untuk menampung semua siaran yang ada dan bersiaran. Keberhasilan penerapan sistem penyiaran TV digital di Batam telah memungkinkan hal tersebut di atas terjadi di kota tersebut.

Hengky menambahkan bahwa dua tahun terakhir, masyarakat di Kota Batam telah memiliki banyak pilihan tontonan. Sudah ada siaran khusus anak-anak, khusus shopping, dan olahraga. Ke depannya Hengky juga yakin akan ada lagi tambahan-tambahan televisi yang bersiaran di Wilayah Layanan Siaran Kepulauan Riau-1.

Saat ini, dengan siapnya empat pilar penting pendukung program ASO, memungkinkan Kota Batam menampung 10 lembaga penyiaran swasta (LPS) yang telah memiliki izin, yaitu Batam TV, NET Batam, RTV Batam, TV TPI, RCTI Kep. Riau, MNC Kep. Riau, INews Batam, Trans TV Kep. Riau, SCTB Batam, Indosiar Kota Batam. Dengan empat penyelenggara multipleksing yaitu TVRI, RCTI, Trans TV, dan SCTV, masih sangat dimungkinkan penambahan siaran atau stasiun baru.



Kesiapan Infrastruktur Multipleksing Secara Nasional

Kota Batam dan Kota Tegal adalah gambaran yang diinginkan terjadi pada 56 Wilayah Layanan Siaran (166 kabupaten/kota) dalam program ASO tahap pertama. Gambaran tersebut tidak terlalu muluk bila melihat kesiapan infrastruktur multipleksing secara nasional.

Dari data yang ada, kesiapan infrastruktur multipleksing pada ASO tahap pertama telah mencapai 100 persen. Multipleksing sebagai sarana terpenting migrasi siap menampung lembaga-lembaga penyiaran atau siaran televisi yang ada. Kesiapan ASO tahap pertama penting mengingat cakupannya yang besar sekaligus menunjukkan kesiapan semua komponen untuk bersama-sama beralih ke teknologi penyiaran TV digital.

Sedangkan untuk ASO tahap kedua, kesiapan multipleksing pendukung mencapai 54,84 persen. Dari 31 wilayah layanan siaran yang mencakup 110 kabupaten/kota, telah siap 17 wilayah layanan siaran. Lalu 14 wilayah layanan siaran di antaranya masih mengejar penyiapan. Kemudian untuk ASO tahap ketiga, dari 65 wilayah layanan siaran (65 kabupaten/kota), telah siap 17 layanan siaran dengan kesiapan mencapai 68,00 persen. Artinya masih ada 8 wilayah layanan siaran yang perlu dituntaskan penyiapan multipleksingnya dalam beberapa bulan ke depan.

Reratanya, secara keseluruhan kesiapan infrastruktur multipleksing adalah 80,36 persen, yaitu sudah siap 90 wilayah layanan. Kesiapan 80,36 persen tersebut menumbuhkan optimisme persiapan ASO secara nasional. Kominfo terus mengawal proses pembangunan multipleksing tersebut. Dalam catatan, lembaga penyiaran yang menjadi pengelola multipleksing adalah LPPS TVRI, Trans, Metro, MNC group, Emtek Group, Viva, NTV (Nusantara TV), dan RTV (Rajawali TV).

Masyarakat Puas saat Beralih ke **Siaran TV Digital**

Salah satu alasan optimisme tersebut adalah tanggapan positif masyarakat terhadap kehadiran siaran TV digital. Kerian masyarakat menikmati tayangan gambar dan suara yang benar-benar bersih serta jernih sesaat setelah beralih ke siaran TV digital jadi salah satu hal membanggakan.

Bahkan, masyarakat menunjukkan dukungannya terhadap siaran TV digital ketika mengetahui mudahnya beralih ke siaran TV digital, tidak perlu mengganti televisi dan antena, serta tidak ada biaya berlangganan untuk menontonnya. Ini yang terjadi di Kota Tegal dan Kota Batam, antusiasme masyarakat meningkat setelah mengetahui kelebihan dan manfaat dari siaran TV digital di daerahnya.

"Jadi, (setelah sosialisasi) saya tahu, kalau (siaran) TV digital lebih baik daripada TV analog. Nyari program lebih gampang. Dengan senang hati saya ingin ngasih tahu ke tetangga, teman dekat, famili. Saya siap mengasih tahu dan siap membantu gimana caranya pemasangan (STB) dari analog ke digital," kata Kristina, warga Margadana Kota Tegal yang ditemui saat Kominfo menggelar survei kesiapan beralih ke siaran TV digital di Kota Tegal.

Kota Batam dan Kota Tegal memberikan gambaran bagaimana kesiapan siaran televisi digital untuk menyambut perpindahan masyarakat Indonesia dari siaran analog. Pengalaman Daryono dan Kristina yang sudah beralih ke TV digital sesungguhnya merupakan bentuk partisipasi dukungan masyarakat umum agar proses migrasi siaran TV analog ke digital dapat diselesaikan pada 2 November 2022 seperti yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Frekuensi *digital dividend* untuk transformasi digital di Indonesia itu sudah di ambang penantian.





Repositioning Industri Media Ketika **Kualitas Jurnalisme** Terjun Bebas

Farida Dewi Maharani

Pranata Humas Ahli Madya
Koordinator Media Cetak Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP

Negara demokrasi membutuhkan kualitas jurnalisme yang mumpuni sebagai penjaga kebenaran. Untuk itu publik membutuhkan media sebagai 'clearing house of information'.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah segala hal dan cukup mengguncang industri media Indonesia. Perubahan peta industri media terus berubah sesuai perkembangan zaman, ketika dulu media cetak sedang berjaya tiba-tiba hadir media radio dan kemudian hadir media televisi. Meskipun pada akhirnya menemukan ekuilibriumnya dan setiap jenis media tersebut tetap bertahan dan bertumbuh sesuai target unik dari produk informasi masing-masing. Berdasarkan pengalaman tersebut, industri akan menemukan titik keseimbangannya sendiri dengan terus berbenah diri menciptakan konten dan program berkualitas untuk mengunci *target audience* yang disasarkan.

Bagaimana dengan saat ini? Perkembangan teknologi menggoyang kembali industri media untuk menemukan posisinya kembali. Kemunculan media *online* berbasis web pada tahun 1995 yang dipelopori oleh Republika *Online* (17 Agustus 1995), Kompas *Online* (14 September 1995), Tempo Interaktif (6 Maret 1996) dan diikuti oleh kemunculan media daring lainnya membuat peta bisnis bidang ini berubah. Sekarang, sebagian publik beralih pada media baru ini karena beberapa alasan seperti kecepatan, kemudahan diakses di manapun, informasi yang lebih berlimpah tanpa harus berlangganan di setiap media tertentu.



Dampaknya saat ini, media *online* berlomba mengejar kecepatan tanpa mempertimbangkan validitas dan akurasi data ataupun informasi. Tanpa disadari hal ini sudah cukup lama terjadi di Indonesia. Lantas apakah kita menuntut media hanya dari aspek kecepatan dan judul bombastis saja demi mengejar *clickbait*? Dapat dibayangkan apa yang terjadi ketika kita hidup di negara demokratis namun tenggelam di pusaran informasi yang kita sendiri mempertanyakan kebenarannya. Tentu tidak berharap demikian, yang diharapkan adalah media sebagai penjaga kebenaran, bukan media yang terbawa arus pola sosial media yang dapat menghasilkan dan menayangkan informasi apapun tanpa validasi dan klarifikasi.

Jika menilik kembali pada teori komunikasi Mc. Quail dalam bukunya *Mass Communication Theories* (2000 : 66), ada enam perspektif dalam hal melihat peran media: Pertama, melihat media massa sebagai *window on event and experience*, diharapkan melalui media khalayak dapat mengetahui berbagai peristiwa di luar jangkauan fisiknya. Kedua, media sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*, yaitu media merupakan cermin yang menampilkan apa adanya berbagai peristiwa. Ketiga, media sebagai *gatekeeper* informasi ke publik, memilih kelayakan informasi yang disajikan ke publik. Keempat, media sebagai *guide* ataupun *interpreter* yang mampu menerjemahkan suatu peristiwa dalam konteks tertentu yang mudah dipahami oleh publik. Kelima, media sebagai *interlocutor* bahwa media tidak hanya menyediakan informasi namun juga menjadi kawan komunikasi bagi publik.

Untuk memenuhi 6 perspektif peran media tersebut, maka media tidak hanya mengimbangi kecepatan sosial media, namun harus memiliki standar operasional validasi dan klarifikasi data, fakta dan informasi bahkan wajib melakukan *cover both side*. Standar operasional ini bukan saja dibakukan oleh instansi media, namun juga ditumbuhkan di setiap individu jurnalis.

Kegamangan Media Mainstream

Perlu digarisbawahi bahwa perubahan-perubahan pada media akan diikuti perubahan pada masyarakat (straubhaar, 2008: 13-15). Ketika media sosial hadir dengan fasilitas futuristik dan *friendly* dalam penyajian informasi, ini menarik perhatian

publik untuk mencoba hal baru, dan pada akhirnya membentuk pola cara mengkonsumsi informasi di masyarakat.

Data Kepios (datareportal.com) per Februari 2022 memperlihatkan 68,9% penduduk Indonesia aktif di sosial media angka ini naik 12,6% dari tahun sebelumnya dan penduduk Indonesia menghabiskan waktu di sosial media sebanyak 3 jam 17 menit per hari. Kemudian kita coba sandingkan dengan data hasil survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai sosial media dalam hal mencari informasi. Sebanyak 73% responden mengatakan, media sosial merupakan sumber yang biasanya diandalkan untuk mendapatkan informasi.

Data tersebut memperlihatkan pergeseran medium informasi publik bergeser ke sosial media yang menyediakan informasi yang lebih beragam, lintas negara, konten yang *friendly*, dan kemasan konten yang futuristik dan menarik.

Ukuran *clickbait* dan algoritma di kemudian hari menimbulkan permasalahan baru dan jika tidak segera ditangani maka kita akan kehilangan karya-karya jurnalis yang berkualitas.

Untuk menunjukkan “kehebatan konten” mereka maka persaingan antar pemilik akun media sosial mendewakan algoritma, *viewer*, *engagement* untuk menunjukkan seberapa menariknya konten mereka, hal inilah yang turut menggiring media *online* menciptakan ukuran “konten bagus” yaitu jumlah *clickbait*. Ukuran *clickbait* dan algoritma di kemudian hari menimbulkan permasalahan baru dan jika tidak segera ditangani maka kita akan kehilangan karya-karya jurnalis yang berkualitas. Bangsa ini akan kehilangan tempat mereka mencari informasi yang kredibel. Kenapa? Karena pada akhirnya media yang mengandalkan hidup bisnisnya hanya dari *revenue ads* akan terjebak dengan target jumlah klik dari pembaca. Semakin banyak berita yang diklik maka iklan *ads* yang diterima juga akan banyak.

Apakah besar? Pengakuan dari beberapa teman media yang sempat *ngobrol* mengatakan tidak terlalu karena sebagian besar masuk ke kantong platform. Meskipun nilai *revenue ads* ini relatif, bagi sebagian pemilik media *online* kecil yang hanya hidup dari *ads* ini tentu akan fokus mengejar pemasukan dari sana, toh ada pangsa pasarnya.

Wajar jika pangsa pasar lokal cukup besar. Hal ini sejalan dengan data Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 memperlihatkan hasil penghitungan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) Nasional masuk dalam kategori aktivitas literasi rendah, yaitu berada di angka 37,32. Indeks Alibaca sendiri adalah indeks yang menyajikan gambaran mengenai aktivitas literasi membaca masyarakat di 34 provinsi Indonesia.

Dari 34 provinsi di Indonesia, dari data Indeks Alibaca ini tidak ada satupun yang masuk dalam level aktivitas literasi tinggi (60,01 - 80,00) dan sangat tinggi (80,01 - 100,00). Hanya 9 provinsi yang masuk kategori level sedang (40,01 - 60,00) dan sisanya masuk kategori level rendah (20,01 - 40,00) dan sangat rendah (0 - 20,00).

Indeks Alibaca yang juga mengukur dimensi budaya dalam penghitungannya, memperlihatkan kebiasaan membaca di 34 provinsi Indonesia masih rendah. Ini adalah salah satu faktor mengapa masyarakat kita lebih memilih berita dengan judul *clickbait* dan seringkali tidak membaca kembali teks berita di dalamnya. Walhasil menggiring media untuk mengejar klik dari judul dan tidak



mematuhi kembali etika jurnalistik yang seharusnya menjadi pegangan profesionalisme media.

Bangun Ekosistem Usaha Kompetitif

Sudah selayaknya media *mainstream* tidak memosisikan diri bertarung dengan media sosial, atau membuntut di belakang media baru. Karena selama media *mainstream* mengekor pada media sosial dan media baru dan masih mendewakan algoritma dan *clickbait* maka akan sulit membangkitkan kembali jurnalisme berkualitas.

Menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk membangun ekosistem industri informasi yang lebih sehat, agar kita tetap dapat diasupi oleh informasi-informasi yang berkualitas. Jurnalis berkualitas akan memberikan asupan sehat bagi publik, publik yang sehat secara pemikiran akan menciptakan demokrasi yang berkesinambungan.



Pertama kita perlu menata banyaknya jumlah kemunculan media-media *online* baru yang sangat beragam sekali. Dewan Pers pernah mengklaim ada sekitar 40 ribuan jumlah media *online*, meskipun mereka tidak mendata secara spesifik dan hanya mendata media-media *online* yang tervalidasi di Dewan Pers yang jumlahnya mencapai 1,734 media.

Saya sendiri pernah melakukan riset kecil dengan mengumpulkan rekan-rekan media di beberapa provinsi, dan dari hasil riset tersebut didapatkan bahwa sebagian besar media lokal berupa media *online* memang tidak memvalidasi media mereka di Dewan Pers. Cukup beragam alasan yang diberikan, seperti tidak ada dana untuk membuat badan usaha, karena untuk menjadi badan usaha mereka membutuhkan syarat khusus yang tidak bisa dipenuhi. Rerata modal yang mereka sediakan tidak banyak, bahkan banyak dari mereka tidak memiliki kantor resmi, pegawai hanya 2 atau 3 orang yang merangkap-rangkap tugas sebagai jurnalis, *marketing*, pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, maupun administrasi.

Belum lagi jumlah pegawai yang minim tersebut digaji di bawah UMR, dan mereka mengamini bahwa mereka membutuhkan pemasukan yang saat ini sangat bergantung pada *clickbait* agar ada pemasukan *ads*. Peluang mereka mendapatkan kesempatan placement dari instansi pemda atau pihak lain kecil, karena rerata mensyaratkan bukti validasi dari Dewan Pers.

Apakah kita perlu menata jumlah media-media baru ini dengan membatasi jumlah atau memperketat kembali aturan pendirian usaha media? Jika itu dilakukan kita kembali kepada masa lalu yaitu membatasi kebebasan pers dengan aturan-aturan. Ekosistem yang baik seharusnya membiarkan media-media itu tumbuh namun dibuatkan *gatekeeper* agar tidak kebablasan, dalam hal ini peran Dewan Pers dalam untuk memvalidasi industri media perlu diperkuat.

Di sisi lain kebijakan wajib validasi ini perlu didukung oleh instansi lain dan juga publik itu sendiri. Misal saja praktik di beberapa daerah, mereka akan beriklan atau melakukan kerjasama jika media daerah tersebut tervalidasi, jika semua instansi melakukan ini maka dengan sendirinya industri media akan sadar pentingnya validasi. Peran penting lain adalah mengedukasi publik untuk mencari informasi-informasi ke media yang kredibel, sehingga ketika masyarakat sudah paham bagaimana mencari informasi yang kredibel maka dengan sendirinya pengunjung media-media *online* tidak kredibilitas ini akan kehilangan audience mereka.

Kedua, membangun ekosistem bisnis yang kolaboratif. Untuk menciptakan informasi yang kredibel itu bukan perkara mudah, selain aspek modal yang besar juga terkait relasi kedekatan dengan senior, pemangku jabatan, petinggi-petinggi, narasumber A1 dan lainnya. Aspek modal yang bisa dikolaborasikan antara lain sharing teknologi, perkembangan teknologi cukup cepat sekali, sehingga hanya pihak-pihak bermodal besar saja yang memiliki kemampuan untuk mengupdate perkembangan teknologi. Bagaimana media-media *mainstream* memberikan kesempatan kepada media-media *online* baru untuk berkolaborasi dari aspek sharing teknologi, manajemen, konten dan perlindungan hukum menjadi penting.

Dalam hal perlindungan hukum, bagaimana media saling mendukung antar awak lintas media ketika ada awak media lain terjerat hukum. Pola-pola kolaborasi seperti ini penting dipikirkan agar media-media tidak hanya dikuasai oleh media *mainstream* besar yang memang memiliki kekuatan modal yang cukup. Keberimbangan penyebaran media juga menjadi penyeimbang demokrasi.

Untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat juga memerlukan peran pemerintah untuk melindungi industri media nasional dan lokal dari gempuran industri platform global yang saat ini menguasai industri informasi. Beberapa negara yang sudah memulai untuk mengeluarkan regulasi perlindungan industri informasi antara lain Australia, Uni Eropa dan Perancis. Perancis merupakan negara pertama yang mengadopsi regulasi tentang hak cipta di Uni Eropa. Regulasi itu bertujuan memberikan perlindungan hak kepada penerbit berita, juga memastikan mereka mendapat kompensasi yang adil atas penyebaran konten secara *online* di Google maupun platform lain. Selain Perancis, tahun lalu Australia memaksa Google dan Facebook untuk membayar hak penerbit saat menampilkan konten mereka.

Melalui pidatonya di Hari Pers Nasional 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah mendukung inisiatif regulasi mengenai "*publisher right*" untuk melindungi industri media atas nama "menjaga marwah kualitas jurnalisisme". Dalam agenda pembentukan regulasi tersebut perlu di cermati bersama jangan sampai regulasi tersebut hanya memberikan keuntungan kepada media *mainstream* bermodal besar saja agar marwah jurnalisisme berkualitas juga didapatkan oleh media-media yang tidak bermodal besar.

Ketiga, bersama sama seluruh awak insan media untuk berkomitmen mengembalikan kembali fungsi media sebagai "*clearing house of information*" di tengah gempuran media sosial. Menurut Lippmann (1922), salah satu masalah yang paling mendasar dari media di dalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Sehingga fungsi media menjaga demokrasi dapat dilakukan jika media bertugas sebagai penjaga kebenaran dengan cara menyajikan informasi yang valid dan terverifikasi.

Saat ini semua orang bisa menjadi pembuat konten di sosial media namun tidak semua pihak dapat

menyajikan konten berbasis riset yang kuat. Agar tetap bertahan di tengah gempuran sosial media, media *mainstream* harus dapat menghasilkan konten-konten berkualitas, antara lain konten yang telah melalui berbagai tahapan riset dan validasi sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat mengajak publik berpikir kritis.

Untuk itu industri media perlu didorong memiliki bidang penelitian dan pengembangan (*litbang*) yang kuat. Fungsi *litbang* tidak hanya mengukur *impact* dari pemberitaan yang dikeluarkan media dan pengukuran nilai *ads*, namun *litbang* harus diperkuat dengan kemampuan untuk melihat prospek bidang jurnalis kedepan dengan perkembangan teknologi yang cukup dinamis.

Dengan kemampuan itu diharapkan industri media dapat segera beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tentu penguatan *litbang* lain yang tidak kalah adalah kemampuan *litbang* menyediakan data dan informasi yang akan dibutuhkan jurnalis untuk menghasilkan konten yang dapat menghubungkan antar peristiwa dan konteks serta konten-konten klarifikasi interpretasi bukan hanya sekedar konten *fact checking*.

Media yang berhasil bertahan adalah media yang menghasilkan karya jurnalis yang bergerak dalam koridor fakta dan data sehingga akan membentuk *truth* dan akhirnya media tersebut akan mendapatkan *trust* dari publik. Untuk mendapatkan *trust* tersebut media harus memainkan peran *cover both side*, klarifikasi, dan validasi. Mari kita yakini, bahwa pada akhirnya publik akan membutuhkan informasi kredibel, hanya saja media perlu berbenah dan berjuang bersama agar equilibrium tersebut tercapai. (FDM)



Profil Singkat

Nama:
Farida Dewi Maharani

Jabatan:
Pranata Humas Ahli Madya
I Koordinator Media Cetak
Direktorat Pengelolaan Media
Ditjen IKP

Rasa ingin tahu adalah “
kualitas
dalam terbaik
jurnalisme

- Leila S. Chudori, *Laut Bercerita*



Tips Dan Trik Komunikasi Publik Di Era Post Truth

Dr. Don Bosco Doho, S.Phil, MM. CET

Dosen Etika dan Filsafat Komunikasi - Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta

Bahwa komunikasi berperan sangat penting dalam segala aspek kehidupan, tidak ada orang yang meragukan. Dalam tatanan dunia baru yang penuh dengan berbagai ketidakpastian, komunikasi tetap mutlak dibutuhkan. Komunikasi sebagai pilar kehidupan digunakan untuk menjaga agar masyarakat tidak panik. Entah dilakukan secara konvensional atau melibatkan kecanggihan teknologi pada era media baru, peran komunikasi apalagi komunikasi publik tidak dapat disepelekan. Akan tetapi jika sekadar berkomunikasi saja tidak perlu repot-repot memikirkan trik dan tip yang jitu untuk bisa mempersuasi lawan bicara.

Ketika berurusan dengan publik luas, komunikasi membutuhkan keterampilan manajemen, lebih dari sekedar manajemen bicara. Bila para petinggi di negeri ini masih kerap mempertontonkan cara mengeluarkan pernyataan yang asal dan menuai kegaduhan, itu tandanya ada persoalan serius dengan komunikasi publik di kementerian dan lembaga negara kita. Ada kompetensi yang harus dilatih. Siapa yang melatih para pejabat publik itu tentu orang yang berkompeten di bidang komunikasi publik. Dengan demikian komunikasi publik dapat disampaikan secara elegan, penuh kebaikan, menyejukkan dan mencerahkan syukur-syukur turut mencerdaskan anak bangsa.

Komunikasi publik yang elegan tidak memantik kekeruhan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pas. Pengelola komunikasi publik di belakang petinggi kementerian/lembaga harus memiliki nilai lebih




dalam hal memastikan *content* sebab *content is the king*, memahami konteks karena *context is the queen*, dan mampu memainkannya dengan penuh kreativitas, karena sejatinya *creativity is the princess* dalam dunia komunikasi publik.

Secara mendasar komunikasi publik diartikan sebagai bentuk kegiatan penyampaian pesan kepada banyak orang, di mana terjadinya pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi atau instansi. Sarana penyaluran komunikasi publik dapat memanfaatkan media massa, kegiatan orasi atau aksi demonstrasi, situs jejaring sosial, reklame, spanduk, dan berbagai media lain yang bisa menjangkau publik. Muara dari komunikasi publik ini ialah menyerap aspirasi publik, mempercepat penyampaian informasi, diseminasi kebijakan, juga menyampaikan program pemerintah baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah maupun daerah.


Pada galibnya, komunikasi publik sangat dibutuhkan pada pada masa krisis yaitu masa di mana persepsi terkait dengan peristiwa yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, yang bisa mengancam harapan para pemangku kepentingan baik itu masalah keselamatan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan tentunya kondisi ini secara serius berdampak pada kinerja suatu organisasi. Penanggung jawab komunikasi publik perlu memprediksi dan mengantisipasi gejala publik ketika pesan tersampaikan.

Ambil contoh kenaikan BBM di tengah pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Penaikan PPN dari 10% ke 11% oleh Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan atau dapat ditunda? Isu Presiden tiga periode dan penundaan pemilu yang kini sedang menjadi bola liar mestinya tidak perlu terjadi jika komunikator publik kementerian/lembaga terkait mengelola komunikasi publik secara prudent dan disampaikan pada *timing* yang tepat, dengan cara yang tepat. Sayang seribu sayang, publik tidak terhubung secara proper ketika kondisi tidak nyaman itu nyata dalam hari-hari ini.

Manakala terjadi krisis, manajemen komunikasi publik urgent diperankan agar dapat mengurangi kesenjangan (*gap*) dalam informasi. Untuk itu, strategi komunikasi publik perlu memperhatikan suara publik. Pola komunikasi ini merupakan umpan



Manakala terjadi krisis, manajemen komunikasi publik urgent diperankan agar dapat mengurangi kesenjangan (*gap*) dalam informasi. Untuk itu, strategi komunikasi publik perlu memperhatikan suara publik.



balik terhadap aktivitas komunikasi interaktif lembaga, yang melibatkan keikutsertaan publik (*public involvement*) dalam penanganan krisis. Salah satu masalah komunikasi publik yang masih dialami oleh Indonesia bahkan dunia sekalipun di tahun 2020 hingga sekarang adalah penanganan informasi publik terkait pandemi Covid-19 yang merupakan bagian dari komunikasi bencana (krisis) dan komunikasi kesehatan.

Robert A. Logan menulis mengenai Health Campaign Research dalam Bucchi & Trench (2008), bahwa komunikasi publik mengenai kesehatan bersifat informatif dan persuasif. Tujuannya untuk mengubah pengetahuan, kesadaran, dan sikap publik mengenai cara untuk mengatasi suatu penyakit atau kesehatan. Pada sisi lain, harusnya komunikasi politik, komunikasi pendidikan, dan bentuk komunikasi lainnya harus dapat dikelola secara bijak agar layak dikonsumsi oleh publik. Kalau demikian komunikator publik mesti *high tech* dan *high touch* agar mencapai *high truth* dan akhirnya *trustable*.

Belajar dari Sejarah

Di era *post-truth* atau pasca-kebenaran, orang gampang percaya akan informasi yang diulang-ulang. Steve Tesich, penulis untuk majalah *The Nation*, dilaporkan oleh *Pikiran Rakyat* (2021), adalah orang pertama yang menggunakan kata *post-truth* pada tahun 1992. Dari penggunaannya, *post-truth* merupakan keadaan di mana masyarakat tidak terlalu peduli lagi dengan kebenaran atau sesuatu yang empiris. Fakta objektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini. Emosi, perasaan, dan kepercayaan masing-masing individu yang lebih dipentingkan dalam keadaan tersebut.

Di era *post truth* banyak orang lupa pada nasihat bapak dan ibu guru agar kita mencari informasi yang terpercaya dan didukung dengan fakta. Kini era *post-truth* justru fakta dikesampingkan dan akhirnya sulit untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tidak lagi disepakati dan diterima secara umum karena masyarakat seringkali lebih memilih mengabaikan fakta-fakta objektif.

Sedikit menoleh ke sejarah. Di Amerika era Presiden Gerald Ford, yang menjabat Presiden ke-38 Amerika Serikat menggantikan Nixon, memaafkan semua kejahatan yang pernah dilakukan Presiden Nixon saat menjabat sebagai presiden. "Kita mulai menyamakan kebenaran dengan berita buruk dan kita tidak menginginkan berita buruk lagi, tidak peduli seberapa benar atau vitalnya hal itu bagi kesehatan kita sebagai sebuah bangsa. Kita meminta pemerintah untuk melindungi diri kita dari kebenaran".

Skandal Iran/Contra di bawah pemerintahan Reagan semakin menguatkan kenyataan bahwa rakyat Amerika takut akan kebenaran. Alhasil sesuatu yang negatif diberitakan secara masif dan berulang-ulang kemudian menjelma menjadi fakta positif. Artinya hal yang buruk secara praktis dibicarakan dan diinformasikan untuk di-*frame* sebagai fakta positif, maka ujungnya menghasilkan hal positif.

Lain padang, lain belalang, lain lubuk lain ikannya, ternyata sebuah pemeo yang tidak terbantahkan. Jika di Amerika di tahun 1974 terjadi *post truth*, cerita kebalikannya terjadi di Brasil. Sebuah fakta yang sejatinya positif tetapi dikampanyekan secara masif seolah-olah sebagai hal yang negatif maka



yang benar diterima bahkan diyakini sebagai yang negatif. Artinya yang positif dalam kenyataan, di-*frame* secara negatif dan berkali-kali disampaikan, buahnya menjadi negatif. Belajar dari dua fakta sejarah di atas maka kita perlu mengelola pesan dalam komunikasi publik agar menghasilkan *value* yang sesungguhnya.

Trik Komunikasi Publik di era Post Truth

Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), menggambarkan komunikasi publik sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Sedangkan tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran.

"*Post-truth*" bisa menyerang kebenaran yang sudah mapan sehingga muncullah "*pseudo-truth*" di tengah masyarakat. Dalam memenangkan peperangan melawan *post truth*, setiap komunikator publik perlu belajar dari banyak pedoman untuk menjadi komunikator handal



serta berhasil mencapai *trust* dari publik. Berikut adalah langkah antisipatif untuk menghasilkan buah komunikasi publik yang diharapkan:

1 Fact Finding and Feedback

Fenomena *post-truth* merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Sebelum melakukan penyampaian pesan dalam perspektif komunikasi publik, para pejabat yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik harus pandai menemukan fakta di lapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data, fakta, dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan berikutnya. Gagal memetakan apa yang terjadi di lapangan merupakan awal bagi malapetaka selanjutnya.

Di tahap awal ini hal yang paling diperlukan adalah kepekaan komunikator publik dalam mendengarkan dan menemukan fakta yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah di kementerian dan lembaga pemerintah tertentu.

Tahap ini lazim dinamakan sebagai tahapan analisis situasi. Analisis situasi merupakan bagian perencanaan. Ingat pepatah, jika Anda gagal merencanakan sesuatu maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Kejelian memetakan siapa publik yang menjadi audiens atau kelompok sasaran adalah separuh kesuksesan komunikasi publik.

2 Planning and Programming

Tahapan perencanaan dan penyusunan proses penyampaian komunikasi publik merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan publik. Informasi yang terkumpul di tahap pertama ini digunakan untuk membuat keputusan tentang program, tujuan, tindakan strategi, taktik dan tujuan komunikasi publik. Pembuatan rencana dan program adalah membuat keputusan-keputusan strategi dasar apa yang akan dilakukan dengan urutan apa dalam menanggapi atau mengantisipasi masalah atau bahkan peluang.

3

Action and Communicating

Dalam komunikasi publik, sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada publik sebagai penerima pesan dalam rangka mencapai pemahaman yang maksimal. Terkadang, secara virtual penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sumber pesan atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Untuk itu dibutuhkan teknik pengkomunikasian yang ideal.

Kebenaran memang kadang sulit diutarakan karena berbagai pertimbangan, seperti kerahasiaan. Tapi saat yakin menyampaikannya, siapapun bakal terkejut dengan respon positifnya. Proses ini merupakan tidak lanjut setelah melakukan perencanaan. Komunikator publik harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang yang sudah disiapkan. Tindakan dilakukan sesuai fakta yang ada sehingga dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa mempengaruhi opini publik.

Langkah ketiga mencakup pelaksanaan program tindakan dan komunikasi publik yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapai tujuan komunikasi. Dalam melaksanakan program, kegiatan komunikasi publik harus mencakup tujuh C komunikasi publik, yaitu *credibility* (kredibilitas), *context* (konteks), *content* (isi), *clarity* (kejelasan), *continuity* dan *consistency* (kesinambungan dan konsistensi), *channels* (saluran), serta *capacity of audience* (kapasitas audiens).

4

Evaluation

Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal hingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi publik yang digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja.

Langkah terakhir dalam proses komunikasi publik ini mencakup penilaian persiapan, pelaksanaan dan hasil program. Adalah yang yang berlaku umum bahwa evaluasi merupakan proses yang terus menerus dan penting dilaksanakan. Evaluasi tentang suatu kegiatan komunikasi publik boleh menyangkut apakah tujuan komunikasi publik sudah tercapai atau belum.

Apakah komunikatornya adalah orang yang tepat dan kompeten pada bidangnya? Media yang digunakan dalam pengkomunikasian pesan apakah memadai atau tidak, *timing* yang dipilih dalam penyampaian komunikasi publik sudah sesuai atau belum. Seluruh poin evaluasi itu dapat dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar kegiatan komunikasi publik selanjutnya untuk tema atau isu publik lainnya.

Keempat tahap di atas sangat penting dan lazim dilakukan serta saling terkait satu sama lain. Bila terjadi kendala atau ketidakcocokan dan salah penerapan, maka dapat diduga bahwa hasil kegiatan pelaksanaan program komunikasi publik sebuah lembaga, sampai penilaian hasilnya tidak signifikan untuk tujuan pengambilan keputusan secara tepat dan benar. Tahapan standar ini dapat dijalankan secara konvensional dan pola baru. Dalam konteks itu, komunikator publik dapat memanfaatkan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi.



Komunikasi publik diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam sebuah kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Indonesia membutuhkan komunikator publik yang handal dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sejauh ini disebut-sebut petinggi negeri ini yang dianugerahi penghargaan sebagai komunikator terbaik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kedua pejabat publik ini memperoleh penghargaan Best Communicators of The Year dari PR Indonesia lantaran dinilai memiliki kinerja komunikasi yang cemerlang.

Tentu di belakang layar kedua petinggi negeri ini ada sosok mumpuni yang menangani tahapan komunikasi sebagaimana distandarkan oleh para pakar. Jika mereka dinilai sebagai komunikator yang cemerlang, tentu itu semua tidak terlepas dari kolaborasi antara pejabat tinggi negara dengan pranata komunikasi di kementerian/lembaga tersebut. Mau menjadi komunikator publik yang unggul, pintu dan kesempatan tetap terbuka.

Penutup

Penyampaian pesan yang mengkombinasikan fakta data (rasional) dengan cerita yang berkembang di masyarakat (emosional) juga resep ampuh menerjang lautan *post-truth*. Namun resep ini tetap tak berlaku bagi pihak yang berseberangan, karena bagaimanapun *trust is not rational*. Sampaikan yang benar jika itu benar, dan sampaikan yang salah dengan cara yang benar. Hoaks yang bertumbuh subur di era *post truth* harus dikikis dengan kompetensi dan melalui penguatan personal filter yang baik. Literasi media harus diawali dengan banyak membaca buku teks yang kaya akan fakta dan data yang dapat dipercaya.

**Indonesia
membutuhkan
komunikator publik
yang handal dalam
mengkomunikasikan
kebijakan
pemerintah agar
dapat dipahami
oleh seluruh
lapisan masyarakat
Indonesia.**



Profil Singkat

Nama:

Dr. Don Bosco Doho, S.Phil,
MM. CET

Jabatan:

Dosen Etika dan Filsafat
Komunikasi I Institut
Komunikasi dan Bisnis
LSPR Jakarta



@nur.naina06

STB belinya dimana?



@ar1ku_

Yang stb gratis dari pemerintah itu kapan si min?



__ryann25

Talegong Garut ada ga?



muhamadazi09

Min @kemenkominfo kalo untuk STB gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, itu kapan ya dibagikan kepada masyarakat ? Dan apakah ada persyaratan khusus untuk bisa mendapat STB gratis tersebut ?



99.cahaya.langitt

Tegal tahap brp???



@nur.naina06

STB belinya dimana?



__ryann25

Talegong Garut ada ga?





Apa itu ASO?

ASO singkatan dari analog *switch off*, penghentian siaran televisi analog untuk berpindah/migrasi menjadi siaran televisi (TV) digital. Bukan hanya migrasi dari sisi frekuensi, tapi tentang teknologinya. Penyiaran TV digital menggunakan frekuensi radio VHF/UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital.

Mengapa harus pindah ke siaran digital?

Dalam penyiaran TV analog, semakin jauh dari stasiun pemancar TV, sinyal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya dengan penyiaran TV digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih, sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. Singkat kata, penyiaran TV digital hanya mengenal dua status: Terima (1) atau Tidak (0). Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima maka gambar-suara tidak muncul.

Apa manfaatnya?

Pertama, penghematan frekuensi, karena TV analog bersifat boros memakan banyak spektrum frekuensi. Jika bermigrasi ke TV digital, Indonesia akan punya frekuensi tersisa/dividen digital sebesar 112 Mhz. Kedua, untuk menambahkan fitur-fitur kebencanaan (*early warning system/EWS*). Ketiga, pemirsa dapat melihat tayangan yang lebih jernih dari sisi suara dan menarik dari sisi gambar yang lebih jelas. TV digital juga akan membuat masyarakat bisa menikmati fitur-fitur yang tidak ada di TV analog seperti penambahan teks, informasi, kemudian bagi kaum disabilitas, serta *close caption* yang bisa dihidup-matikan (*v on-off*).

Biaya apa saja yang perlu dikeluarkan masyarakat?

Ada dua pilihan, satu untuk membeli *set-top-box*. Harga ideal *set-top-box* yang berkualitas baik itu di antara 200-300 ribu. Bagi masyarakat yang mau mengganti televisinya juga bisa, harga di pasaran sekitar 1 juta. Tapi harus diperhatikan, beli TV yang bertulisan "**Siap Digital**"

Apa itu *set-top-box*?

Set-top-box (STB) adalah perangkat tambahan untuk mengkonversi siaran atau mengubah modulasi digital sehingga kompatibel atau sesuai dengan TV analognya, sehingga masyarakat yang memiliki TV analog dapat menyaksikan tayangan TV digital. STB sudah mendukung Digital Video Broadcasting-second generation terrestrial (DVB-T2), standar TV digital di Indonesia. STB tidak memerlukan antena parabola dalam menerima sinyal digital, cukup menggunakan antena TV biasa (UHF).

Seperti apa mekanisme subsidi *set-top-box*?

Kementerian Kominfo sudah menyiapkan piranti *set top box* (STB) untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Proses pembagian STB untuk keluarga tak mampu ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Menurut data tersebut, sebanyak 6.737.971 rumah tangga miskin tinggal di wilayah terdampak ASO. Data itu, berisikan detail informasi penerima bantuan, seperti nama, NIK, KK, hingga alamat lengkap.

Apa saja syarat penerima subsidi?

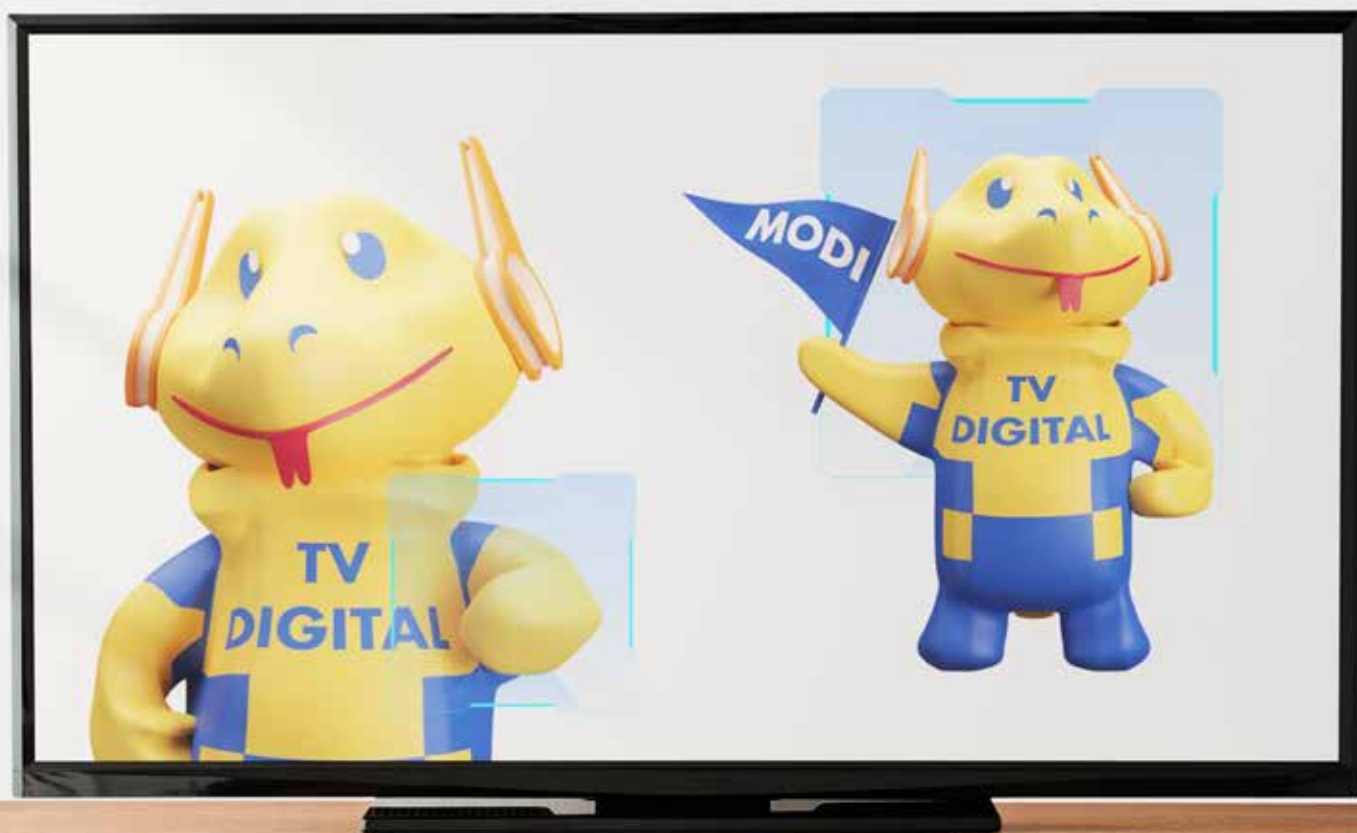
Pertama, Warga Negara Indonesia (harus dibuktikan dengan KTP) dan tergolong rumah tangga miskin. mempunyai televisi analog, dan menikmati siaran TV terestrial (KK sebagai pelengkap). Kedua, harus terdaftar dalam DTKS Kemensos, atau data perangkat daerah di bidang sosial. Yang ketiga, lokasi penerima bantuan harus berada dalam cakupan yang terdampak ASO.

Apakah saya bisa mendaftar untuk menerima subsidi STB?

Tidak. Pembagian STB gratis tidak menerima pendaftaran, tapi dibagikan. Anda dapat mengecek apakah Anda masuk atau tidak dalam daftar penerima *set top box* gratis lewat situs resmi DTKS Kementerian Sosial, dengan memasukkan informasi seperti wilayah dan nama pada situs tersebut.

Bagaimana cara mencari siaran TV digital dengan STB?

Pertama, pastikan TV dalam keadaan AV. Bila terdapat beberapa AV pada TV, sesuaikan dengan koneksi STB (apakah AV1, AV2, dan seterusnya). Setelah disesuaikan, nyalakan STB lalu tekan tombol "MENU" pada *remote* STB. Cari menu "PENCARIAN SALURAN" dan pilih "PENCARIAN OTOMATIS". Perangkat akan melakukan pencarian siaran. Setelah selesai, pilih "SIMPAN".



Bagaimana alur distribusinya?

Proses distribusi STB dilakukan secara pintu ke pintu (door to door) oleh pihak penyelenggara logistik. Petugas melakukan verifikasi dan validasi KTP dan KK calon penerima bantuan yang terdaftar di DTKS Kemensos. Apabila penerima bantuan tidak dapat menunjukkan KTP dan/atau KK (hilang atau dalam proses pembuatan), maka dapat menunjukkan surat pengantar dan/atau surat keterangan dari RT/RW.

Apabila penerima bantuan sedang sakit, tidak berada di rumah, atau meninggal dunia, maka bantuan dapat diberikan ke anggota keluarga (dalam 1 KK). Lalu petugas akan memberikan tanda terima yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan berupa berita acara tanda terima, atau berupa dokumen elektronik.

Tahap selanjutnya adalah serah terima STB sekaligus memasang perangkat sampai berfungsi dengan baik. Saat STB telah terinstal, akan muncul kode batang (QR code) pada layar televisi. Petugas lalu memindai QR code tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan menginput nama, NIK/KK, alamat, serta memfoto penerima bantuan dan KTP. Keberadaan QR code tersebut untuk menjamin STB yang didistribusikan tepat sasaran.

Bagaimana cara mengecek sinyal TV digital di daerah saya?

Pertama, unduh **sinyalTVdigital** di Play Store/Apple Store dan pasang di ponsel Anda. Setelah terpasang, aplikasi akan meminta izin untuk mengakses lokasi. Setelah Anda klik izinkan, aplikasi akan menampilkan map sesuai lokasi Anda berada. Cek pada peta, warna apa yang muncul. Warna merah dan jingga menandakan sinyal bagus. Warna hijau dan kuning menandakan sinyal sedang. Sementara warna biru tua dan abu-abu menandakan sinyal buruk.

Bagaimana cara mengetahui jadwal tahapan ASO untuk daerah saya?

Jadwal lengkap daftar wilayah penghentian siaran TV analog dapat dilihat pada situs berikut: <https://siarandigital.kominfo.go.id/jadwal-aso>

Adakah layanan informasi yang bisa dihubungi?

Layanan informasi resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melalui saluran telepon 159.

Informasi lengkap tentang ASO, mekanisme pembagian STB, hingga cara pemasangan STB dapat dilihat pada Buku Saku Migrasi Siaran TV Digital berikut:



Sumber:

Kemkominfo TV

kominfo.go.id

siarandigital.kominfo.go.id

indonesia.go.id



Menteri Komunikasi dan Informatika mengucapkan

Selamat Hari Kartini

“

Perempuan punya potensi besar menjadi motor penggerak perubahan. Teruslah belajar dan tingkatkan kecakapan digital.

Johnny G. Plate
Menteri Kominfo



Migrasi ke TV Digital

Bagaimana Cara Menangkap Siaran TV Digital?

Cara Menangkap Siaran TV Digital

- 1 Pastikan di daerahmu sudah terdapat siaran televisi digital
- 2 Gunakan antena TV yang **mampu menangkap sinyal UHF**, baik antena outdoor maupun antena indoor
- 3 Pastikan perangkat TV sudah dilengkapi dengan tuner/ penerima **siaran televisi digital DVBT2**
- 4 Jika televisi hanya menerima siaran analog, pasang **dekoder decoder/STB DVBT2**.
- 5 Setelah STB terangkai dengan TV, lakukan pencarian sinyal di STB di menu setting.
- 6 Bila TV sudah Siap Digital, cukup scan ulang program di menu setting TV.
- 7 Masukkan kode pos secara benar saat pengaturan awal, TV lama/Analog masih dapat digunakan dengan menambahkan STB dengan teknologi DVB-T2.

Televisi yang belum memiliki saluran penerimaan siaran digital tidak harus melakukan penggantian perangkat dengan televisi baru.

Ingin tahu Informasi Mudik Lebaran 1443 H?

Pemudik bisa Akses *e-Book* “Mudik Aman & Sehat”



Masyarakat yang hendak mudik tak perlu lagi bersusah payah mencari buku atau peta berukuran besar agar bisa menikmati perjalanan dengan aman. Sebagai bagian dari penyelenggaraan informasi publik, Pemerintah baru-baru ini menyediakan sebagai bagian dari penyelenggaraan informasi publik, Pemerintah baru-baru ini menyediakan bernama ‘Mudik Aman dan Sehat 2022’. Buku itu merupakan panduan bagi para pelaku perjalanan mudik yang hendak merayakan Hari Raya Idulfitri 1443 H bersama sanak keluarga di kampung halaman. *e-Book* tersebut disusun bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Satgas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI dan instansi terkait lainnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengungkapkan di dalam buku itu tersedia informasi, imbauan dan saran, sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik dalam momen lebaran tahun 2022 bagi masyarakat.

“Kita luncurkan buku ini sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mudik, sehingga mudah mencari informasi mudik dan protokol kesehatan selama mudik, dalam buku saku yang bisa diakses kapan saja, di mana saja,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9, (FMB9) Pemudik Pintar Lebaran Lancar dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (25/04/2022).

Informasi seperti syarat dan protokol kesehatan, perjalanan angkutan lebaran, tips persiapan mudik dan nomor telepon penting dalam buku elektronik

ini tersaji secara ringkas dan jelas. Selain itu, adapula informasi lalu lintas terkini yang dilengkapi dengan saluran CCTV, pengamanan, penukaran uang hingga layanan komunikasi dan vaksinasi, menambah keragaman informasi.

“Di dalamnya, terdapat nomor-nomor penting yang diperlukan saat mudik, syarat dan ketentuan mudik, program mudik gratis, rekayasa lalu lintas, hingga protokol kesehatan. Informasi dalam e-book yang tersedia untuk umum ini termasuk di dalamnya sejarah tradisi mudik dan tips menjaga kesehatan sesampainya di rumah,” kata Dirjen IKP Kominfo.

Usman Kansong menyatakan, kementerian tempatnya bekerja juga telah memastikan kesiapan jaringan elektronik dan telekomunikasi selama masa mudik dan lebaran 2022. Menurutnya, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses yang lancar.

“Termasuk dalam panduan Mudik Aman & Sehat, tertulis juga informasi lalu lintas, Korlantas dan NTMC Polri. Juga informasi tentang titik vaksinasi di Jalan Tol Jagorawi, aplikasi PeduliLindungi dan Maps memasak kembali ke rumah masing-masing misalnya di Jawa,” tuturnya.

Dirjen IKP Kominfo menyebutkan, seluruh informasi seperti keamanan dan kenyamanan yang tersaji dalam e-book Buku Mudik Aman dan Sehat ini dapat diakses publik melalui link berikut <https://linktr.ee/mudik2022>.

“e-Book ini dikemas sebagai *living document*. Artinya, informasi yang ada di dalamnya akan selalu kami *update* jika ada kebijakan dan protokol kesehatan terbaru, atau informasi terbaru,” jelasnya.



“

Kita luncurkan buku ini sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mudik, sehingga mudah mencari informasi mudik dan protokol kesehatan selama mudik, dalam buku saku yang bisa diakses kapan saja, di mana saja

”

Lakukan Monitoring

QoS dan QoE

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah ketika menjelaskan kepada pekerja media minggu lalu pada Jumat (22/04/2022, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Dedy Permadi mengatakan Kementerian Kominfo terus melakukan evaluasi terhadap *Quality of Service* dan *Quality of Experience* terhadap rencana mudik di tahun ini.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita sedang melakukan dan memastikan bahwa layanan telekomunikasi itu bisa diberikan dengan optimal sepanjang masa mudik lebaran itu. Jadi kami berkoordinasi dengan perusahaan telekomunikasi (operator seluler) untuk memastikan keandalan layanan internet selama mudik lebaran tahun 2022”

Dedy yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Kominfo menyampaikan, sejak akhir tahun 2021 lalu pihaknya telah memiliki satu sistem pusat monitoring kualitas telekomunikasi nasional yang berada di Gedung Belakang lantai 8. Sistem monitoring berfungsi untuk melakukan metode pengukuran jaringan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kominfo.

“Kita sudah memiliki mesin dan juga sistem baru untuk melakukan pengukuran secara nasional jika ditemukan performa yang kurang optimal di titik tertentu misalnya, maka kita akan berkomunikasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk bisa mengevaluasi, kemudian mengoptimalkan layanan yang ada,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, penambahan jaringan di titik-titik mudik seperti di *rest area* juga termasuk beberapa hal yang dievaluasi saat ini.

“Karena kan, kita masih ada waktu sekitar dua minggu ke depan ya untuk memastikan misalnya pusat-pusat atau fasilitas publik termasuk *rest area* itu bisa disediakan akses internet. Tentu itu



kaitanya dengan 4G dulu ya, kalau 5G sementara ini kita baru men-*deploy* di tiga belas titik yang ditempatkan di pusat industri maupun pusat-pusat aktivitas masyarakat lainnya,” ungkap Juru Bicara Kementerian Kominfo.

Staf Khusus Dedy Permadi menambahkan, Kominfo akan memberikan 5G *experience* di pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti dalam penyelenggaraan Ministerial Meeting G20 yang nantinya diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 mendatang di Bali, Indonesia.

“Jadi masih cukup terbatas, termasuk juga untuk *event-event* nasional seperti G20. Kita memastikan bahwa di situ ada di 5G *experience* untuk para *leaders* atau untuk para kepala negara yang akan hadir di Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Bali, sudah mulai kita siapkan dari sekarang. Namun untuk kepentingan mudik, Kementerian Kominfo fokus untuk menyiapkan jaringan 4G. Kualitas jaringan 4G harus dipastikan keandalannya untuk melayani masyarakat yang mudik lebaran,” tandasnya. **(hm.ys)**



**Unduh e-Book Mudik
Aman & Sehat:**

[https://indonesiabaik.id/
ebook/mudik-aman-sehat](https://indonesiabaik.id/ebook/mudik-aman-sehat)



Potensi Perempuan dalam Wirausaha Digital,

Bukti Nyata Perjuangan RA Kartini Tidak Sia-Sia

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam wirausaha digital semakin meningkat, dan perempuan juga menjadi pilar utama dalam pertumbuhan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa partisipasi perempuan dalam wirausaha digital ini tidak lepas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini.

“Berbagai capaian perempuan dalam UMKM Indonesia menjadi bukti nyata bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak sia-sia. Apalagi kita telisik lagi, tidak dapat dipungkiri banyak kartini-kartini modern dengan inspirasi dari Raden Ajeng Kartini,” ujar Menteri Johnny dalam webinar Kartini Day Women in Digital Entrepreneurship yang diselenggarakan secara virtual Kamis (21/4/2022).





Sebagai pilar utama dalam bisnis UMKM, Menkominfo menyebutkan bahwa kontribusi perempuan dalam bisnis UMKM termasuk ultra mikro sebesar 60% dari total 58 juta UMKM di Indonesia. Bahkan menurut survei Google pada tahun 2020 berjudul *Advancing Women in Entrepreneurship*, tingkat partisipasi perempuan Indonesia di bidang kewirausahaan adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara. Meskipun, tantangan terkait jaringan bisnis dan kebutuhan peningkatan keterampilan pemasaran masih harus dihadapi oleh perempuan Indonesia.

“Survei ini juga mengungkapkan fakta bahwa 8 dari 10 perempuan yang sudah atau baru ingin berusaha di Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan dalam berbisnis,” ungkap Menteri Johnny.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah mengakibatkan ekonomi global mengalami kontraksi yang dalam, termasuk di Indonesia. Namun kehadiran UMKM menjadi penting dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. UMKM dikatakan Menteri Kominfo menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berperan penting dalam pemulihan dan pematapan

ekonomi Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta dengan persentase kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 61,97%.

“UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan secara nasional. Kontribusi yang besar tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa UMKM perlu didukung untuk dapat bertahan, dapat beradaptasi, dan dapat berkembang di masa pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.

UMKM juga dikatakan Menkominfo perlu melakukan berbagai inovasi dan transformasi dengan mengoptimalkan saluran *online* untuk pemasaran produknya. Seiring dengan perkembangan implementasi transformasi digital pada sektor UMKM, peluang perempuan untuk berpartisipasi sebagai wirausaha digital atau digital *entrepreneurship* semakin terbuka lebar. Kondisi ini menawarkan fleksibilitas peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai wirausaha, pekerja, yang kita harapkan menjadi solusi wujud dari aksi non diskriminasi.

Di samping itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menekankan akan pentingnya penguasaan teknologi digital bagi perempuan agar bisa memaksimalkan potensi ekosistem digital.

“Penguasaan teknologi digital sangat strategis. Pengusaha perempuan berkontribusi sebesar 9,1 % terhadap PDB dari sektor UMKM. Peran perempuan menjadi penting karena mampu mengantisipasi perubahan tuntutan dan perilaku pasar pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat *uncertain* dan kompleks,” ujar Menparekraf.

Lebih lanjut Menteri Sandiaga mengatakan bahwa potensi perempuan dalam kewirausahaan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perempuan inovatif dalam mencari solusi dan peluang.

“Perempuan tidak takut untuk mengambil risiko yang menjadi orientasi utama dalam berwirausaha. Kalau semua dikembangkan, kita akan punya perempuan hebat dan mandiri di *entrepreneurship* Indonesia,” katanya.

Digital Entrepreneurship Academy

Sebagai upaya membangun perspektif kewirausahaan digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan pelatihan pelatihan Digital *Entrepreneurship* Academy (DEA). Pelatihan ini menjadi bagian dari program Digital Talent Scholarship dengan melibatkan perusahaan teknologi global seperti Google, Ant Group, Meta, dan juga perusahaan rintisan lokal seperti Bukalapak dan GoTo.

Tahun ini pelatihan DEA tahun ini diberikan kepada kepada 15.134 pelaku wirausaha di Indonesia, dan 63 persen di antaranya adalah perempuan. Menteri Kominfo berharap melalui pelatihan ini

bisa terbentuk gelombang digitalisasi UMKM Indonesia yang dapat menggerakkan ekonomi digital di Indonesia. “Kita berharap program ini dapat membangkitkan semangat para wirausaha perempuan dan semangat UMKM untuk pulih bersama,” harapnya.

Pemerintah menyadari potensi dan peran penting perempuan bagi bangsa dan negara, sehingga melalui pelatihan DEA ini, Kementerian Kominfo akan melatih para wirausaha Indonesia untuk *go digital*. Berbagai tema pelatihan yang diberikan tidak hanya terkait dasar kewirausahaan digital, tapi juga mengenai wawasan agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional hingga literasi keuangan dan keamanan siber.

“Melalui program ini kita berharap terbentuk gelombang digitalisasi UMKM Indonesia yang dapat menggerakkan ekonomi digital dalam negeri,” ujar Menkominfo.



Kolaborasi Lintas Sektor Adalah Kunci

Peringatan Hari Kartini dikatakan Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba harus menjadi momentum dalam memperkuat kemauan dan upaya untuk meningkatkan kesetaraan, keterwakilan dan peran aktif perempuan di berbagai lini.

“Lewat kolaborasi berbagai tantangan bisa dihadapi dengan menghadirkan kebijakan inklusif dan mendorong kesetaraan bagi perempuan” ujar Sekjen Mira.

Ditambahkan Sekjen Mira bahwa kolaborasi lintas sektor juga bisa menjadi kunci terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. “Agar Indonesia

bisa mewujudkan kesetaraan gender, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah dan pihak industri tapi juga masyarakat luas,” tambahnya.

Langkah nyata dalam mendorong kesetaraan gender ini telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membawa isu penyediaan akses inklusif dalam forum Presidensi G20. Dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG), Kementerian Kominfo membawa isu Digital Literacy dan Digital Skill.

“Pembahasan isu tersebut agar perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan dapat lebih terlibat dan berpartisipasi lebih di ruang digital” ungkap Sekjen Mira.



Jurus Perempuan Cantik Kebal Hoaks

Oleh: Lida Noor Meitania

Pranata Humas Ahli Muda Ditjen IKP



Pengguna internet perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Siapa bilang perempuan selalu ketinggalan? Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021, sebanyak 56,6 persen dari 10.000 responden adalah perempuan pengguna internet. Sebagian di antaranya telah memiliki kecakapan bermedia digital yang tinggi. Sebanyak 51,6 persennya memiliki *digital skills* tinggi, 61,4 persen *digital ethics* tinggi, 47,9 persen *digital safety* tinggi, dan 62,3 persen *digital culture* tinggi.

Pentingnya literasi digital pada perempuan tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri, namun juga untuk melindungi anak, orang tua, keluarga, bahkan lingkungannya. Apalagi sampai dengan sekarang kita telah 2 tahun lebih mengalami haru biru pandemi Covid-19 mulai dari *panic buying* masker dan susu beruang, kelangkaan oksigen, bahkan kematian keluarga dan rekan kerja.

Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kawan sesama ASN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebut saja RA (37), tidak khawatir dengan hoaks vaksin Covid-19 yang beredar. Ia telah menyaring informasi dari sumber yang valid. Setelah izin vaksin Covid-19 untuk anak keluar dan mempertimbangkan saran serta anjuran dari para dokter, ahli, dan pemerintah, ia pun mendaftarkan putrinya yang berusia 6 tahun mengikuti vaksinasi Covid-19 di sekolah.

Vaksinasi Covid-19 telah dimulai tahun lalu. Sampai 25 April 2022, telah ada 16,93 persen orang yang mendapatkan vaksinasi booster (vaksin.kemkes.go.id, 2022). Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 dan usia 6-11 tahun pun telah dilakukan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta intensifikasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun, seiring penambahan jumlah anak yang menderita Covid-19. Menkominfo berharap orang tua ikut berperan dalam mendorong putra-putri mereka segera berpartisipasi melakukan vaksinasi sebagai langkah perlindungan dalam melawan Covid-19 (Infopublik.id, 2022).

Mengutip data Kementerian Kesehatan per 25 April 2022, capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun untuk dosis pertama baru 77,85 persen atau 26,4 juta anak. Sedangkan dosis kedua berada pada kisaran angka 62,35 persen atau 16,46 juta anak, dosis ketiga ada 0,01 persen atau 2,63 ribu anak. Pemerintah menargetkan 26,4 juta anak usia 6-11 tahun akan mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sedangkan capaian vaksinasi anak usia 12-17 tahun untuk dosis pertama baru 94,29 persen atau 25,17 juta anak. Sedangkan dosis kedua berada pada kisaran angka 80,89 persen atau 21,6 juta anak, dosis ketiga ada 1,4 persen atau 374,96 ribu anak. Pemerintah menargetkan 26,7 juta anak usia 12-17 tahun akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 (Vaksin.kemkes.go.id).



Berantas Hoaks

Hoaks yang masih terus menyebar menjadi kendala penanganan Covid-19 di Indonesia, sehingga harus terus dilawan dan ditangkal bersama, pesan Menkominfo. Penanganan sebaran isu hoaks Covid-19 periode 23 Januari 2020 sampai dengan 25 April 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menunjukkan ada 2.176 temuan isu hoaks Covid-19 yang beredar di masyarakat. Pengajuan *takedown* sebaran hoaks Covid-19 terbanyak ditemukan di media sosial Facebook sebanyak 5.130, Twitter 577, Youtube 55, Instagram 52, dan Tik Tok 41 (Kominfo.go.id, 2022).

Perempuan tidak hanya menjadi korban hoaks tapi juga menjadi penyebar hoaks. Maret 2020, SFH (27), seorang perempuan dari Bondowoso, ditangkap polisi karena menyebarkan video iring-iringan mobil petugas

dan ambulans keluar dari terminal diberi narasi yang menyesatkan seolah-olah petugas tengah mengevakuasi TKW yang terjangkit corona. Postingan yang tersebar di media sosial dan grup WhatsApp tersebut sudah meresahkan warga. Faktanya, video yang berdurasi 47 detik itu merupakan kegiatan sosialisasi, pengecekan kesehatan, dan kerja bakti dalam rangka antisipasi Covid-19 (Kompas.com, 2020).

Seorang dokter yang mengklaim tidak percaya Covid-19, Lois Owien, ditangkap polisi meskipun ia akhirnya tidak ditahan, Juli 2021. Menurut perempuan ini, kematian banyak orang bukan akibat virus lantaran adanya interaksi antarobat. Bahkan ia menambah kegaduhan di media sosial karena menyerang dokter lain dengan tuduhan hoaks (Detik.com, 2021).

Akibat percaya hoaks mengenai dampak buruk vaksin Covid-19, sebagian warga asli Papua di Kabupaten Jayawijaya panik. Menurut Engelber Sorabut, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, hoaks vaksinasi Covid-19 membuat warga ragu menerima vaksin (INews.id, 2021).

Tidak hanya di Indonesia bagian timur, takut mengikuti vaksinasi Covid-19 juga dialami warga di ibukota. Vaksinator dari Yanmed Satkes Denma Markas Besar TNI Jakarta dr. Fitriana Hapsari mengatakan hoaks mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) masih menjadi alasan pertama masyarakat takut untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Menurutnya, masyarakat ragu mengikuti vaksinasi meskipun telah datang ke tenda (Antarnews.com, 2021).

Jurus Cantik

Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkal hoaks. Salah satunya dengan cara CANTIK seperti yang saya lakukan di bawah ini.

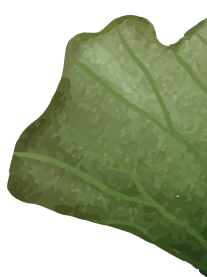
C = Cek Dulu

Cek dulu informasi yang diterima dengan cermat. Lihat, baca, dan pahami keseluruhan informasi tersebut dengan sabar serta tidak terburu-buru. Jangan hanya judulnya saja. Keinginan menjadi yang pertama menyebarkan di grup WhatsApp atau media sosial, menjadi salah satu penyebab mudahnya hoaks tersebar.

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, menyampaikan trik simple untuk mengetahui sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Kalau informasi itu *too bad to be true*, terlalu buruk untuk benar, maka

perlu diwaspadai. Suatu informasi yang *too good to be true* juga perlu dicurigai. Misalnya pemberian bantuan yang sangat besar. Meskipun kecurigaan belum terbukti, setidaknya alarm kita telah berbunyi (Kominfo.go.id, 2021).

Heni Mulyati, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) berpendapat bahwa ada kecenderungan perempuan menyebarkan hoaks tanpa memeriksa fakta. Meskipun, seringkali informasi disebarkan dengan maksud baik supaya orang lain tidak mendapat masalah atau terlibat dalam bahaya (Infopublik, 2021).



A = Amati Sumber Informasinya

Lakukan inisiatif cek fakta. Jika sumber informasi yang dibagikan tersebut dari situs tertentu maka periksa alamat situsny apakah berasal dari media *online* yang merupakan pemeriksa fakta (*fact checker*). Ada beberapa media pemeriksa fakta di Indonesia yang bergabung dalam *International Fact Checking Network*

(IFCN) antara lain liputan6.com, kompas.com, detik.com, medcom.id, tirta.id, turnbackhoax.id. Selain itu, ada chatbot WhatsApp Mafindo di nomor 085921600500 dan Liputan6 Cek Fakta di 08119787670. Kemkominfo juga menyediakan chatbot Telegram yang bisa diakses melalui t.me/antihoaksbot.

N = Nalar

Rizka (37), seorang ibu dua orang anak kembar berusia 10 tahun, memberikan vaksinasi Covid-19 pada anak adalah bentuk ikhtiarnya untuk tetap sehat di saat pandemi Covid-19. Banyaknya hoaks Covid-19 membuat imunitas menurun. Ia menyarankan untuk pintar memilah informasi supaya tidak mudah termakan hoaks.

Sering mengonsumsi hoaks sebagai sumber informasi utama dapat membuat seseorang tidak dapat berpikir kritis dan

tidak dapat menggunakan nalarnya untuk mengklasifikasi fakta. Nalar kritis yang rendah mempercepat penyebaran hoaks (MAFINDO, 2018). Mengasah nalar supaya tidak mudah tercemar hoaks bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Siberkreasi, MAFINDO, maupun komunitas cek fakta lainnya. Biasanya, informasinya disebarakan melalui media sosial dan grup WhatsApp. Apalagi dengan maraknya webinar, daftarnya mudah, gratis, rekamannya pun ada di Youtube.



T = Tegur

Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021, sebanyak 31,5 persen responden menjawab WhatsApp sebagai media yang paling banyak ditemui menyajikan hoaks. Tegur saja anggota keluarga sebar hoaks di grup WhatsApp. Caranya dengan dekati dan beritahu secara personal. Biasanya, mereka akan lebih menerima daripada ditegur langsung. Jangan langsung bilang bahwa mereka menyebarkan informasi yang salah.

Bantu mereka mencari informasi pembandingan yang kredibel bersama-sama. Lalu tunjukkan dan kenalkan rujukan informasi kaya data, misalnya covid19.go.id atau WHO, ajak juga untuk mengikuti media sosialnya. Beritahu juga secara perlahan bahwa tokoh terkenal,

apapun gelar dan profesinya, bukan jaminan kebenaran 100%. Selalu lakukan cek dan ricek (Covid19.go.id, 2020).

Jika diperlukan, bisa minta tolong kepada saudara yang lebih tua atau disegani di keluarga untuk menegur anggota keluarga yang menyebarkan hoaks tersebut. Semakin muda usia cenderung lebih banyak memiliki indeks literasi digital di atas rata-rata nasional dibandingkan usia yang lebih tua. Generasi Z memiliki proporsi 59,7 persen untuk yang lebih tinggi di atas rata-rata nasional, sementara *Baby Boomer* hanya memiliki proporsi 27,9 persen yang ada di atas rata-rata nasional (kominfo.go.id, 2022). Jika masih banyak generasi X dan *baby boomer* yang menyebarkan hoaks, maka sewajarnya generasi Y dan Z yang menegur mereka.

I = Informasi Aktual dan Akurat

Sejak 2021, Facebook telah melakukan uji coba inovasi baru untuk meningkatkan kesadaran penggunaannya terhadap informasi apa yang mau disebar. Sebelum pengguna ingin membagikan sebuah informasi, maka nada peringatan untuk membaca ulang terkait materi yang ingin diunggah. Hal ini dilakukan Facebook untuk mencegah adanya misinformasi dan penyebaran hoaks dalam kanal tersebut.

Jika menemukan hoaks di Facebook maka pengguna bisa melaporkannya dengan klik titik tiga di atas kanan dan pilih laporkan postingan. Facebook

merupakan media yang paling sering ditemui menyajikan hoaks, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Literasi Digital 2021 ada sebanyak 71,9 persen.

Jika menemukan hoaks atau konten negatif lainnya, laporkan saja ke aduan konten. Laporan yang dikirim harus disertai tautan, tangkapan layar (screenshot) tampilan dan alasannya melalui situs aduankonten.id, Facebook Aduankonten.id, Twitter @aduan konten, WhatsApp 08119224545, atau email ke

aduan konten@mail.kominfo.go.id.

K = Konten positif

Buatlah konten positif dan sebarkan. Apapun bentuknya seperti blog, vlog, podcast, sesuaikan dengan target penerima konten. Youtube Kemkominfo TV menyajikan program edukatif yang menghibur, seperti Miss Lambe Hoaks vs Fact Boy. Miss Lambe akan menyampaikan isu hoaks sementara Fact Boy akan mengklarifikasi faktanya. Lakukan kolaborasi dengan komunitas pemeriksa fakta dan kreator konten. Semakin banyak informasi positif maka semakin kebal terhadap hoaks.

Semangat Kartini (1879-1904), perempuan Jawa yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan melalui pendidikan, selalu berkobar sampai saat ini. Kini, Kartini di Indonesia semakin banyak, tidak hanya dari Jawa tapi juga dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat Hari Kartini 2021, semoga perempuan Indonesia semakin kebal hoaks.

HOAX
ITU KAYAK
MANTAN

ABIS DIPUTUSIN MALAH
MENYEBAR
KEBENCIAN

DASAR KELAKUAN
★ MANTANS JAMAN NOW ★

STOP
HOAX
SEKARANG JUGA!

#Kerja3ersama

Indonesia baik.id
IndonesiaBaik.id
IndonesiaBaikID
@IndonesiaBaikid



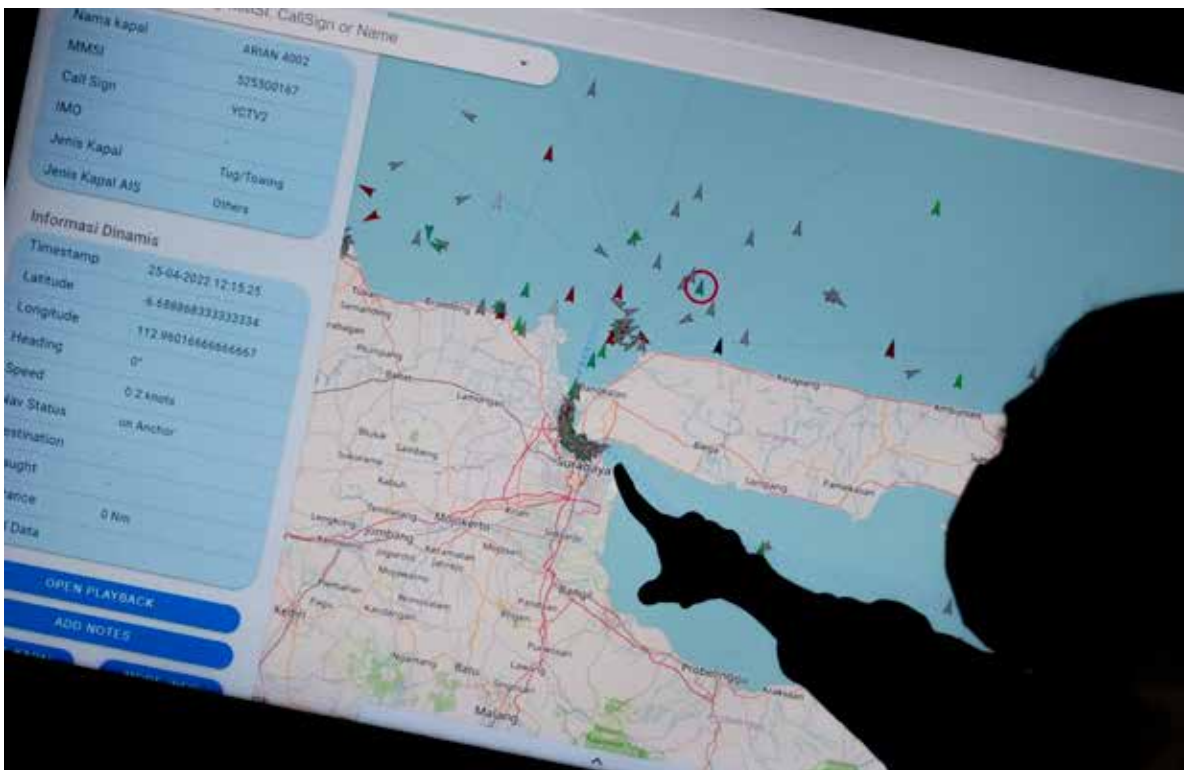


Setelah dua tahun tidak mudik karena pandemi, akhirnya tahun ini masyarakat bisa kembali merayakan Idulfitri bersama sanak saudara. Dalam tradisi hari raya Idulfitri, silaturahmi merupakan hal penting. Aktivitas budaya ini menekankan terbukanya hati dan pikiran atas khilaf dan salah diri maupun orang lain. Mudik adalah peristiwa kolosal tahunan yang menggerakkan masyarakat kembali ke akar hidupnya (rootedness) di kampung halaman.



Pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan mudik lebaran di tahun 2022. Hal ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diperbarui pemerintah. Aturan ini pun sudah disahkan oleh Presiden Jokowi dan mulai berlaku sejak 2 April 2022 lalu.

Aturan ini menandai tahun pertama kembali dibolehkannya mudik di tengah pandemi virus corona. Sebelumnya, pada Lebaran 2020 dan 2021, pemerintah melarang mudik. Idulfitri justru lebih baik dilaksanakan di rumah, baik sendirian maupun bersama anggota keluarga. Di masa tersebut sarana teknologi menjadi media komunikasi dan silaturahmi.



Sekitar 80 juta orang diperkirakan melakukan mudik pada Lebaran 2022. Hal ini dipengaruhi makin longgarnya syarat perjalanan domestik. Selain membolehkan mudik, pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran lainnya, misalnya pada tahun ini umat Islam diperbolehkan untuk shalat tarawih dan shalat Idulfitri berjamaah di masjid.





Hari raya Idul Fitri sesungguhnya adalah momen kemenangan batin setelah berpuasa sebulan penuh. Kemenangan sejatinya bertempat di hati, bukan di permukaan ekspresi sosial.

Selamat mudik dan berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan sampai rasa euforia mudik lebaran ini menjadikan kita jumawa. Harus diingat, masa pandemi belum usai.



ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MARSHHEL CULTURE

Saat polisi mengumumkan bahwa komedian dengan inisial M akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus praktik pornografi melalui sebuah platform, netizen heboh. Kepo beramai-ramai. Mereka langsung meraba-raba siapakah M yang dimaksud. Malih? Mandra? Mongol? Marshel? Mpok Alpa? Bahkan ada yang nekat menyebut nama Maguire, bek Manchester United. Kenapa Maguire? Karena sedang ramai candaan tentang betapa Maguire banyak melakukan *blunder* yang mengakibatkan kekalahan MU.

Akhirnya misteri komedian M tersibak. Dia adalah Marshel, komedian yang sedang menanjak karirnya dalam bidang *stand up comedy*, *host*, dan industri entertainment Tanah Air. Kisah pencapaiannya banyak membuat orang terenyuh karena dimulai dari kekurangan ekonomi. Bahkan kemiskinan sudah sangat lekat dengan bit dan *punchline* dalam penampilannya sebagai komik.

Karirnya sedang menanjak, *to the moon*. Sebuah pencapaian yang susah ditandingi adalah ketika wajahnya tampil di Time Square, New York, dalam kapasitas sebagai *brand ambassador* sebuah produk perawatan kulit. Ini saja sudah merupakan

fenomena yang *out of the box*, *mind blowing*. *From Free York* (baca: Priuk) to *New York*. Begitu dia sering melukiskan pencapaian itu.

Dia sendiri juga mengaku bahwa penampilannya tidak jamak sebagai sebuah model *skin care*. Namun itulah dunia *advertising* saat ini. Makin *out of the box*, makin menarik perhatian, makin viral, makin tercapai tujuan untuk menancapkan merek di benak khalayak.

Jamaknya kasus asusila, pelaku akan dihujat habis-habisan oleh netizen. Namun kali ini "agak lain". Netizen justru kompak memberi dukungan terhadapnya ketika harus menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi. Media juga ramai-ramai meliput kedatangannya bak artis papan atas. Ujungnya mereka malah selfie bersama setelah pemeriksaan.

Demikian juga polisi, menempatkan kasusnya secara proporsional. Bahkan Marshel mengaku diperiksa dalam suasana cair dan penuh gelak tawa. Bagaimana nggak bergelak tawa kalau dia justru bersaksi sambil "ditanggap" untuk *ber-stand up comedy*?

Meskipun statusnya hanya sebagai saksi, namun Marshel mengaku tetap deg-degan menghadapi proses ini karena memang sifatnya berada di pinggir jurang. Setiap saat bisa saja kasusnya didorong ke arah lain. Karena bagaimanapun perbuatannya diakui sendiri sebagai sebuah kesalahan. Namun untuk dihukum? Tidak semudah itu Ferguso. Komedian inisial M ini tidak comply dengan pasal-pasal UU ITE yang bisa menjerumuskannya ke bui, terutama dalam delik penyebarluasan. (Ini menjadi pengingat kita semua bahwa perbuatan dan ekspresi kita yang kadang lepas kendali, sebenarnya masih sangat aman jika kita tidak melakukan penyebarluasan. Terutama secara elektronik.)

“Ketahanan diri” itulah yang menyelamatkannya dari jerat hukum. Namun, ada hal-hal lain yang menyelamatkannya juga dari hisab netizen.

Pertama, anak ini selama ini terkenal inspiratif. Memulai dengan tekun karirnya dari bawah, dan tertata. Dia adalah bekas penonton bayaran untuk acara-acara televisi, kemudian menjadi asisten untuk para komedian. Kisah suksesnya menjadikannya komedian yang dikenal dengan persona mentas dari kemiskinan. Sampai-sampai memiliki program televisi “*Sobat Misqueen*”.

Kedua, dia terkenal dengan *attitude*-nya yang baik terhadap senior, pekerja di industri televisi, dan masyarakat pada umumnya. Bakti kepada orang tua ditunjukkan melalui materi-materi komedi tunggalnya.

Ketiga, dia juga banyak membantu circle-nya yang masih kurang beruntung dalam proyek sosial bernama Lelah Miskin Project. Berbagai kreativitas dan usaha diwadahi di sini agar teman-temannya memiliki penghasilan. Ditampung di

sebuah rumah yang dibelinya khusus untuk mewujudkan idenya itu. Padahal untuk ukuran industri entertainment, kekayaannya masih jauh panggang dari api dibanding senior-seniornya. Namun dia melakukannya tanpa menunggu level sultan tersebut tercapai.

Keempat, netizen paham bahwa motifnya melakukan adalah juga untuk membantu secara finansial. Ini dibuktikan dengan cara transfernya dan jumlahnya yang lebih dari seharusnya.

Tulisan ini bukan untuk membenarkan tindakan komika ini, namun hanya berusaha memahami netizen yang meski memang sering julid dan nyinyir, namun tak jarang juga mampu melihat dan menghadirkan keadilan. Dalam kasus terbaru, netizen berada di pihak musisi “Babang Tamvan” (Andika Kangen Band) yang justru sebelumnya sering di-bully oleh netizen juga. Ketika Sang Babang ini menjadi sasaran olok-olokan oleh musisi baru, maka dengan kompak netizen berbalik berada di pihaknya dan menghujat sang musisi baru.

Bukan hanya sampai di situ, musisi-musisi baru yang dianggap kurang adab itu di-*unfollow* oleh jutaan follower-nya, dibongkar aib-aib riders-nya, juga diungkit pembayaran royalti atas lagu-lagu yang di-*cover*-nya dan membuatnya besar.

Dalam kasus Babang Tamvan ini, netizen mempertontonkan *cancel culture*, praktik mengucilkan seseorang secara massal. Media sosial menjadi wahana yang efektif untuk melakukannya. Sedangkan fenomena sebaliknya justru terjadi pada “komedian berinisial M”. Dia mendapat dukungan netizen meski bertindak “tak benar”. Satunya *cancel culture*, satunya lagi apa ya? Marshel *culture?****



Oleh: FX Bambang Irawan
Humas BAKTI Kominfo



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kanan) bersama Duta Besar Spanyol untuk Indonesia H.E. Francisco De Asis Aguilera Aranda (kiri) bertemu awak media usai menggelar pertemuan, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (08/04/2022). - (AYH)

Terima Kunjungan Dubes Spanyol, Menkominfo Diskusikan Potensi Kerja Sama Sektor TIK

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia H.E. Francisco De Asis Aguilera Aranda. Dalam pertemuan kurang lebih satu jam tersebut kedua pihak membahas potensi kerja sama antarkedua negara di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Pagi ini saya dikunjungi Duta Besar Spanyol Ambassador Francesco mendiskusikan potensi kerja sama Indonesia dan Spanyol, khususnya di bidang teknologi informasi dan aplikasi Informatika," ujarnya usai menerima kunjungan Dubes Spanyol di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (08/04/2022).

Menkominfo menyambut baik kerja sama antara Indonesia dan Spanyol di sektor TIK, terlebih lagi kedua negara telah menjalin hubungan baik.

“Saya menyambut baik kerja sama ini karena memang hubungan Indonesia dan Spanyol sudah berlangsung lama. Dan pembiayaan G to G atau *government to government* antara Spanyol dan Indonesia juga bukan baru, sudah biasa,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, terdapat beberapa proyek kerja sama sudah masuk dalam project list Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang rencananya akan dibiayai Pemerintah Spanyol.

“Khusus untuk teknologi informasi, infrastruktur digital *upstream* dan infrastruktur digital *downstream*, Pemerintah Spanyol ingin membiayai dan mengambil bagian dalam penyiapan infrastruktur tersebut,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan Indonesia membuka ruang kerja sama yang luas untuk terus menghadirkan teknologi modern di Indonesia. “Tentu dengan batasan-batasan bahwa itu kompetitif, teknologi yang dibutuhkan juga teknologi yang modern yang sesuai dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, Dubes Spanyol untuk Indonesia H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda telah menyampaikan komitmen menindaklanjuti potensi kerja sama tersebut. “Jadi tadi Bapak Duta Besar menyampaikan kepada saya bahwa dalam waktu dekat, satu atau dua minggu ke depan akan menyampaikan financing offer dari pemerintah Spanyol untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur TIK di Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo kembali menegaskan potensi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Spanyol mengacu pada praktik umum pada *international financing*.

“Saya tentu menunggunya dan berharap ini untuk mengacu kepada *common practice* yang sudah biasa di *international financing*, yaitu mengacu pada OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) *term and condition*, syarat-syarat dari pembiayaan keuangan Indonesia,” tandasnya.

Dubes Spanyol untuk Indonesia H.E. Francisco De Asis Aguilera Aranda mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo memiliki komitmen dalam membangun sektor TIK di Indonesia.

“Dan di sisi lain, kami menawarkan dukungan pemerintah Spanyol dan keinginan untuk menjalin kerja sama sebanyak mungkin dengan Indonesia,” tuturnya.

Sejalan dengan Menteri Johnny, Dubes Francisco menjelaskan bahwa Spanyol telah lama menjalin hubungan kerja sama dengan Indonesia.

“Kami memiliki persahabatan satu sama lain, kami memiliki hubungan yang sangat baik dan yang pasti perusahaan dan Pemerintah Spanyol sangat bersedia bekerja sama dengan perusahaan, organisasi dan pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan proyek bersama dan mengembangkan sektor TIK yang sangat menjanjikan untuk masa depan,” jelasnya.

Dubes Spanyol untuk Indonesia menilai potensi kerja sama antara Indonesia dan Spanyol dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masa depan masyarakat kedua negara.

“Kami sangat ingin dapat melakukannya di sini, di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya datang ke sini (mengunjungi Menkominfo Johnny G. Plate) untuk memberikan beberapa ide tentang kemungkinan pemerintah Spanyol menawarkan kerja sama ini kepada Indonesia di waktu mendatang,” imbuhnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Anggota DPR RI Rapsel Ali. Adapun Dubes Spanyol H.E. Francisco De Asis Aguilera Aranda didampingi staf Ms. Aitama A Migues Cillero.



Harsiarnas 2022, Menkominfo Minta Lembaga Penyiaran Pastikan Ketersediaan *Set Top Box*

Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-89 tahun 2022 menjadi momentum industri penyiaran di Indonesia bermigrasi dari siaran televisi analog ke digital melalui program *Analog Switch Off (ASO)*.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta lembaga penyiaran publik (LPP) dan swasta (LPS) memastikan ketersediaan *set top box* agar ASO berjalan dengan baik.

"Hari ini hari yang luar biasa, hari ulang tahun lembaga penyiaran dan harus kita pastikan tersedianya perangkat penerima yang baik yaitu *Set Top Box* bagi televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan DVBT2 (*Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial*) atau TV digital," ujarnya saat menghadiri Puncak Peringatan ke-89 Harsiarnas Tahun 2022 di The House Convention Hall, Bandung, Jumat (01/04/2022).

Menteri Johnny menyatakan, kesuksesan program ASO menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara multipleksing, lembaga penyiaran serta masyarakat.

Menurut Menkominfo, salah satu faktor penting penentu keberhasilan ASO dengan ketersediaan infrastruktur digital *broadcasting*, yaitu *multiplexing* (MUX) dan infrastruktur digital yang memadai.

"Kepada tujuh penyelenggara *multiplexing*, saya tentu berharap demi suksesnya digital *broadcasting* di Indonesia agar memastikan infrastruktur *multiplexing* tersedia dengan baik," ungkapnya.

Menteri Johnny menjelaskan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Kedua regulasi itu, menurut Menkominfo, menugaskan lembaga penyiaran dan penyelenggara *multiplexing* untuk memastikan ketersediaan STB bagi keluarga miskin atau pemilik televisi nondigital di Indonesia.

"Saya perlu tegaskan ini, komitmen inilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya ASO *broadcasting* Indonesia," tandasnya.

Dalam PP No 46/2021, Menteri Johnny menyatakan tugas pemerintah akan membantu penyediaan STB dalam program ASO. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong agar lembaga penyiaran di Indonesia membantu masyarakat untuk menyongsong era digital.

"Penyelenggara *multiplexing* yang telah mendapat kewenangan tata kelola *multiplexing*, baik LPP TVRI maupun tujuh LPS untuk memastikan perangkat televisi yang belum memenuhi persyaratan DVBT2 atau TV digital segera terpasang dan siap untuk ikut bersama-sama menyongsong era baru digitalisasi pertelevisian nasional kita," ungkapnya.

Kedaulatan Digital

Menkominfo menyatakan sejarah industri penyiaran Indonesia telah melewati tiga fase, pertama diawali saat radio pertama SRV berdiri di Indonesia sebagai radio perjuangan dan pergerakan.

"Fase yang pertama fase perjuangan pergerakan, di mana lembaga penyiaran juga ikut mengambil bagian sebagai radio pejuang, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan kita, dekolonisasi kedaulatan politik kita sebagai bangsa," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, fase kedua kedaulatan maritim yang dikenal perjuangan peran Perdana Menteri Djuanda menghasilkan konvensi hukum laut PBB United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Fase kedua menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Di mana laut di antara, di, dan sekitar Indonesia, adalah wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan saat ini kita memasuki fase di era kedaulatan yang ketiga, kedaulatan digital," jelasnya.

Fase ketiga menurut Menkominfo merupakan era kedaulatan digital atau digitalisasi ekstrateritorial. Menteri Johnny menyatakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital dengan migrasi penyiaran analog menjadi digital.

"Komitmen Indonesia di ITU (*International Telecommunication Union*) PBB seharusnya Indonesia sudah melakukan ASO di tahun 2015. Walaupun kita akan tertunda sedikit, tahun 2022 ini adalah momentum Indonesia untuk memastikan tanggal 2 November 2022 adalah ASO dan Indonesia boleh mengawali siaran full digitalnya nanti," jelasnya.

Menkominfo mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan program ASO di seluruh tanah air akan menjadikan, masyarakat dapat menikmati kualitas siaran lebih baik. Lebih dari itu, Menteri Johnny menyatakan masyarakat akan menjadi bagian dalam mewujudkan transformasi digital nasional.



"Kita harapkan bahwa televisi nanti akan semakin bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih percaya bahwa televisi penyiaran media yang terpercaya di Indonesia," ungkapnya.

Menkominfo menegaskan era digital ditentukan oleh kesiapan lembaga penyiaran dalam menyukseskan program ASO. Terutama dalam menyediakan STB kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Sekali lagi, kunci suksesnya era baru pertelevisian nasional sebagaimana yang menjadi *tagline* Hari Penyiaran Nasional tahun 2022 ini yaitu, transformasi penyiaran era digital," tandasnya.

Menkominfo menegaskan kembali kesiapan lembaga penyiaran untuk memastikan infrastruktur *multiplexing* tergelar dengan baik di seluruh wilayah siaran dan perangkat penerima akan menjadi kunci sukses digitalisasi penyiaran.

"Khususnya kepada rakyat miskin betul-betul disediakan dengan menghadirkan STB yang terpasang, yang memungkinkan perangkat penerima rakyat miskin dan perangkat penerima televisi di Indonesia seluruhnya telah siap menjadi televisi digital," tegasnya.

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah mencanangkan tiga tahapan ASO diantaranya tahap pertama tanggal 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2 November 2022.

"Mudah-mudahan tiga tahap ini akan berjalan lancar. Adapun lancar dan suksesnya sangat ditentukan kerja bersama kita pemerintah pusat, Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Termasuk kerja erat bersama para penyelenggara *multiplexing* LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran komunitas," tuturnya.

Di akhir sambutan, Menkominfo menyampaikan ucapan selamat kepada ekosistem penyiaran di Indonesia. "Sekali lagi, dirgahayu lembaga penyiaran, selamat Hari Penyiaran Nasional tahun 2022. Jayalah Indonesia, hidup televisi digital Indonesia," ucapnya.

Dalam puncak peringatan Harsiarnas ke-89, Menteri Johnny didampingi Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Rosarita Niken Widiastuti.

Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Suprio, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, serta pimpinan dan perwakilan LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran komunitas se-Indonesia.





Peran Tim Jubir Presidensi G20 Indonesia untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Menyukseskan Perhelatan G20

Dengan banyaknya topik-topik yang diangkat pada Presidensi G20, pemerintah merasa perlu adanya suatu Tim Juru Bicara yang bertugas menyampaikan informasi ke masyarakat. Fungsi dari Tim Juru Bicara tersebut untuk menyampaikan poin-poin penting dari setiap pertemuan dalam Presidensi G20, kepada semua kalangan masyarakat dengan harapan terbentuknya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dedy Permadi mengatakan bahwa tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia sangat penting dalam rangka menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

"Dengan mendapatkan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat turut serta mendukung perhelatan Presidensi G20 yang merupakan momen penting dan bersejarah bagi Indonesia," papar Dedy.

Diketahui bahwa Presidensi G20 2022 ini dipimpin oleh Indonesia dengan mengusung tiga isu prioritas, yakni Arsitektur Kesehatan Global yang Inklusif, Transformasi berbasis Digital dan Transisi Energi Berkelanjutan. Ketiga isu tersebut akan dibahas dalam berbagai pertemuan, baik *Finance Track* maupun *Sherpa Track*, yang terdiri atas berbagai *working groups* (WG) dan *engagement groups* (EG).

Dedy Permadi juga mengatakan bahwa mengingat banyak isu yang dibahas dan cukup kompleks, pemerintah memerlukan beberapa Juru Bicara yang paham dengan isu. "Jadi pada Presidensi G20 Indonesia, tugas juru bicara tidak dibebankan pada satu orang saja, melainkan tim juru bicara," jelas Dedy.

Mengenai masing-masing WG dan EF, peran juru bicara dilaksanakan oleh para pengampu (*chair* dan *co-chair*) masing-masing. "Dalam konteks kebijakan yang lebih krusial, informasi kepada media dan masyarakat juga dapat disampaikan oleh Ketua *Sherpa Track*, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Menteri

Luar Negeri; serta Ketua *Finance Track*, Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia," jelas Dedy Permadi.

Untuk memperluas penyampaian informasi terkait Presidensi G20, tim juru bicara perlu mendapatkan dukungan dari figur yang dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, khususnya kepada generasi z dan milenial. "Oleh karenanya, Pemerintah menunjuk Maudy Ayunda sebagai bagian dari Tim Juru Bicara Presidensi G20," ungkap Dedy.

Selanjutnya, Dedy menekankan bahwa sebagai bagian dari tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia, ada dua tugas yang diharapkan bisa dijalankan Maudy. "Pertama, menyampaikan informasi ke masyarakat luas terkait kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi pada November 2022, khususnya pada Generasi Z dan Milenial. Lalu kedua, menyampaikan perkembangan substansi dan agenda yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan *working group* maupun *engagement group* sepanjang tahun 2022," pungkas Dedy.





Pertumbuhan Ekonomi Digital Meningkat, Dirjen Aptika: Digital Trust jadi Hal Fundamental Bangun Kepercayaan Pengguna

Jakarta, Ditjen Aptika – Identitas atau sertifikasi digital mutlak diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital nasional. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan mengatakan hal itu menjadi penanda bukti keabsahan bagi layanan digital.

“Seperti untuk digunakan dalam dokumen dan transaksi digital, maupun menjadi penanda identitas digital, yang memberi kemudahan pada layanan digital masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam Webinar VIDA Outlook 2022: Tren Penggunaan Identitas Digital dalam mendorong Transformasi Digital Indonesia, dari Jakarta Pusat, Rabu (02/02/2022).

Libatkan Masyarakat, Ditjen SDPPI Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio

Sebagai satuan kerja penyelenggara pelayanan publik, Direktorat Operasi Sumber Daya – Ditjen SDPPI – Kemkominfo berupaya untuk senantiasa menerapkan budaya pelayanan prima dalam pemberian perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio kepada masyarakat.

Sebagai wujud penerapan budaya pelayanan prima, pada tanggal 13 April 2022, Direktorat Operasi Sumber Daya telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio. Bentuk kegiatan ini adalah sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Operasi Sumber Daya adalah satuan kerja yang dinilai berdasarkan kedua acuan kebijakan dimaksud.

Kominfo Terima 5.461 Aduan Penanganan Fintech, Direktur Nyoman: Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum



Jakarta, Ditjen Aptika – Aplikasi teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* kian memudahkan dalam transaksi keuangan di zaman modern, tapi bukan berarti tanpa risiko. Terlebih dengan maraknya *fintech* ilegal yang merugikan masyarakat. Berkaca hal tersebut, diperlukan pengawasan ketat terkait regulasi dan penegakan hukumnya.

“Tujuannya adalah memantau perkembangan *fintech* ilegal di Indonesia ini. Hingga kini Kominfo sudah menangani 5.461 jumlah aduan penanganan *fintech* dari sekitar 6.000-an pada periode Agustus 2018 hingga Desember 2021. Dari jumlah itu, mayoritas aduan yang paling dominan adalah *fintech*,” kata Direktur Ekonomi Digital

Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna dalam Webinar Indonesia Economic Outlook 2022, yang berlangsung hibrida dari Financial Hall CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (25/01/2021).

Direktur LAIP: Smart City bukan Soal Belanja Teknologi tapi Master Plan yang Tepat

Jakarta, Ditjen Aptika – Pengembangan kota cerdas atau *smart city* tidak semata-mata terkait belanja teknologi berbiaya besar. Hal itu bisa disiasati dengan konsep terbuka yang melibatkan banyak pihak untuk membantu pendanaan maupun sumber daya manusia.

“Saya khawatir kita terjebak pada euforia *e-government* yang mendahulukan belanja teknologi. *Smart city* jangan dijawab dengan belanja teknologi, melainkan melalui konsep atau master plan yang tepat,” kata Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono saat seminar daring bertema Tantangan dan Peluang Pengembangan *Smart City* Pasca Pandemi, Rabu (9/2/22).



Harmonisasi Spektrum Perbatasan, Tiga Negara Kembali Bertemu

Jakarta (SDPPI) – Perwakilan tiga negara bertemu dalam *2nd Special Trilateral Meeting on Frequency Registration, Coordination Guideline and Compilation of Handbook between Indonesia, Malaysia and Singapore*. Mereka melakukan koordinasi perbatasan negara dalam rangka harmonisasi penggunaan spektrum frekuensi radio antar ketiga negara yang rutin diadakan setiap tahun.

“Pertama-tama, atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, saya menyapa dengan hangat kepada seluruh delegasi dan saya harap pertimbangan kita pada meeting hari ini memiliki solusi yang lebih baik dari pertemuan sebelumnya,” ucap JFU Analisis Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio Terrestrial Yudhistira Prayoga, Rabu (30/3/2021).



IoT Creation 2022 Dorong Percepatan Implementasi Internet of Things di Indonesia

Jakarta (SDPPI) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Asosiasi *Internet of Things Indonesia (ASIoT)* kembali mengadakan Program IoT Creation 2022 dengan tema *Recover Stronger, Collaboration Beyond Borders*.

“IoT Creation ini merupakan sebuah program yang kita lakukan dalam rangka pencarian, pembekalan, hingga mendorong terbentuknya startup lokal yang fokus mengembangkan perangkat dan solusi IoT,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo Ismail dalam konferensi pers secara daring, Selasa (12/4/2022).

Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Batch Empat Kota Bitung

(Bitung, 08 April 2022) – Bertempat di Hotel Fave Bitung kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS) akademi DEA (Digital Entrepreneurship Academy) Kota Bitung dengan “Keamanan Siber” Resmi dibuka oleh Asisten dua Kota Bitung Drs. Sikamang, M.Si, di dampingi oleh Kepala BPSDMP Kominfo Manado bapak Drs. Darsa Jaya Hedar, M.AP.

Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Pemerintah Kota Bitung diikuti oleh 100 UMKM dari Kota Bitung dan sekitarnya dijadwalkan berlangsung selama dua hari kedepan. Pelatihan tersebut menghadirkan para Instruktur dosen dari Universitas Sam Ratulangi, Lidia M. Mawikere, SE., M.Si, Ak., CA, dari Universitas Klabat, Andria Wahyudi, M.Eng., dari BPSDMP Kominfo Manado, Qurata Ayuni, S.Kom., M.Ikom., dan dari Micromentor, Faradilla Fajrin Alfath.

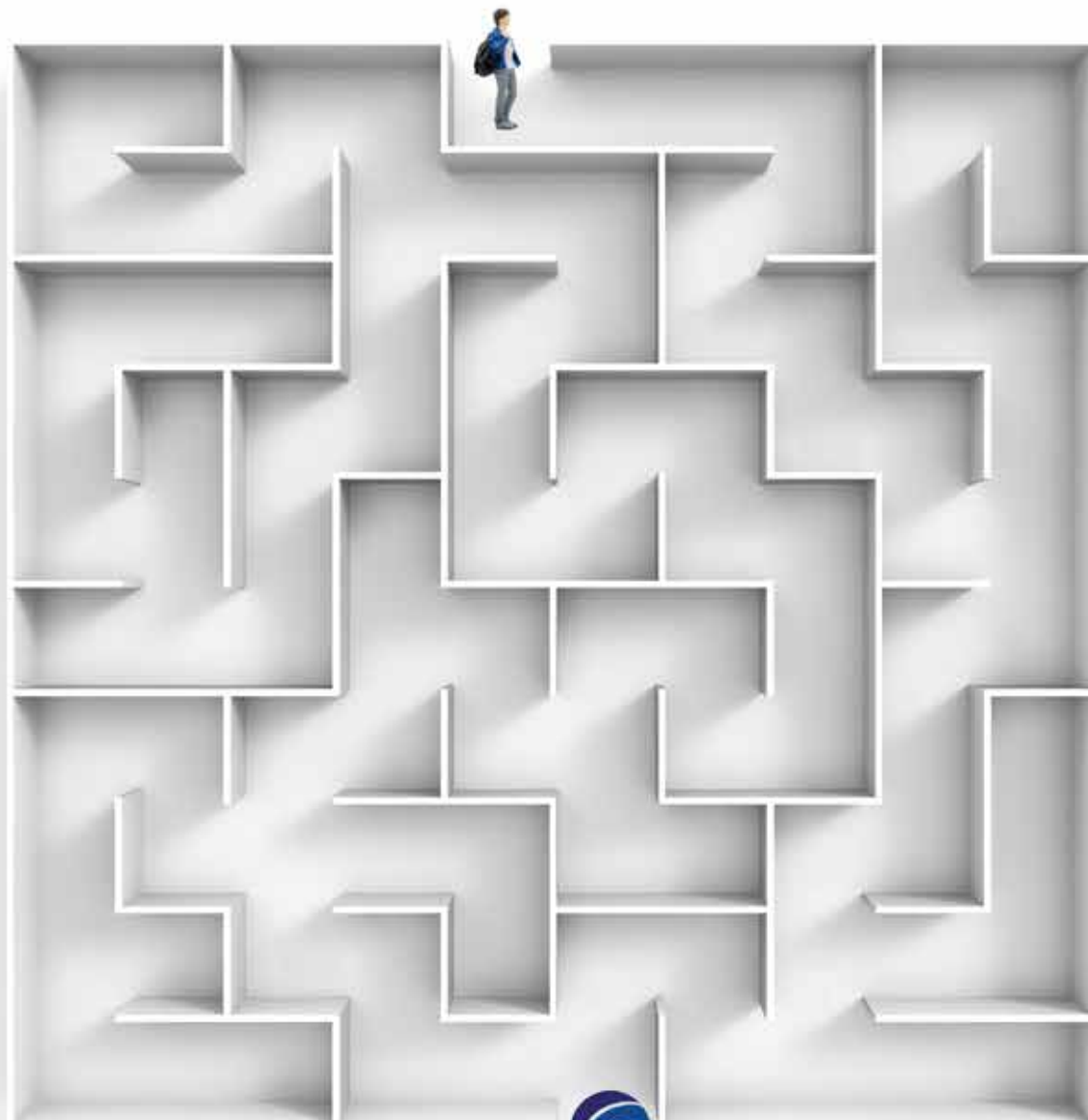


Pahlawanku Inspirasiku, Mari Bangkit dari Pandemi

Jakarta, DJIKP - Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Dulu, pahlawan yang pegang senjata. Sekarang, semangat dan nilai kepahlawanan yang menginspirasi anak muda Gen Z dan milenial agar bangkit dari pandemi COVID-19.

“Sebelum 10 November ada tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda ke-93. Itulah awal dari pergerakan nasional kita. Pemuda-pemuda yang luar biasa merupakan bibit daripada pahlawan. Di situ sudah memunculkan berbagai bahasa, berbagai bangsa, bertanah air satu Indonesia,” kata Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Wiryanta, dalam dialog bertema Pahlawanku Inspirasiku, Mari Bangkit dari Pandemi yang disiarkan langsung dari Studio Jogja TV, Yogyakarta, pada Sabtu (6/11/2021).





Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment



LOH..
KOK SEMUA
CHANNEL PADA
RUNYAM GINI?
APA RUSAK YA
INI TV?



PERASAAN
KEMARIN
AMAN AJA..
ANTENA JUGA
UDAH
NYAMBUNG



OHH..
APA PERLU
SHOCK TERAPEY
NIH TV
HAH?!

GERIGI
NOMOR 2!



BAPAK!!
JANGAN
JURUS
ITU!

BIAR
GUA BERI
JURUS
GOMU GOMU
NO
*LEMBIRU!!

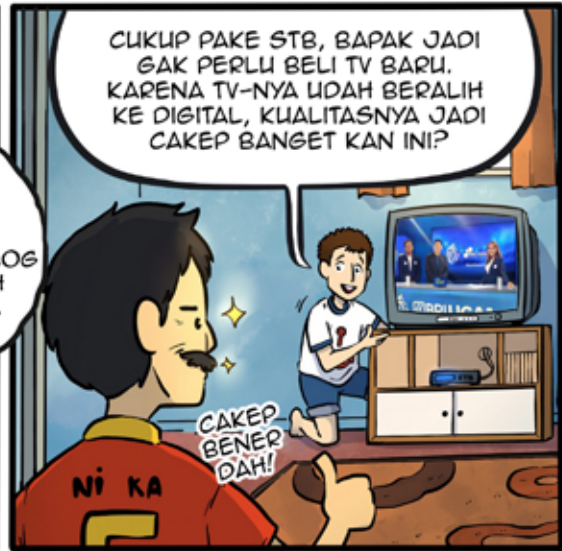
*LEMPAR BELI BARU



INI ADEK
UDAH BELI
STB* BUAT
TV PAK

SOALNYA
PER TANGAL
30 APRIL
SIARAN TV ANALOG
UDAH SWITCH
OFF SECARA
BERTAHAP

*SET TOP BOX



CUKUP PAKE STB, BAPAK JADI
GAK PERLU BELI TV BARU.
KARENA TV-NYA UDAH BERALIH
KE DIGITAL, KUALITASNYA JADI
CAKEP BANGET KAN INI?

CAKEP
BENER
DAH!

NI KA



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
MENGUCAPKAN

Selamat Hari Raya Idulfitri 1443 H

Mari menyambut hari kemenangan dengan suka cita
Mohon maaf lahir dan batin

Johnny G. Plate